

**PEMIKIRAN TENTANG PEMBINAAN
KESADARAN SEJARAH**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK PEMBINAAN KESADARAN DAN PENJERNIHAN SEJARAH

1985

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

PEMIKIRAN TENTANG PEMBINAAN KESADARAN SEJARAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK PEMBINAAN KESADARAN DAN PENJERNIHAN SEJARAH

1985

Penyunting :
A y a t r o h a e d i

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Terbitan buku Kesadaran Sejarah dan Penjernihan Sejarah berupa dua kumpulan kertaskerja para ahli sejarah dalam Proyek Pembinaan Kesadaran dan Penjernihan Sejarah (PPKS). Kertaskerja dalam kegiatan seminar dan penataran dirasakan sangat perlu diterbitkan supaya dapat diketahui dalam kalangan lebih luas, bukan hanya karena memuat hasil pemikiran para sarjana yang berasal dari pelbagai instansi, namun juga karena setiap seminar pada hakekatnya perlu disebarluaskan hasilnya. Dengan demikian dapat dilakukan informasi merata mengenai kegiatan-kegiatan proyek seperti Proyek Pembinaan Kesadaran dan Penjernihan Sejarah ini.

Saya berharap besar, bahwa terbitan ini dapat mencapai tujuan dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan proyek maupun terbitannya.

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN



Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130119123

KATA PENGANTAR

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam bidang kesejarahan ternyata sangat rumit, namun sejarah tetap ramah dan terbuka kepada setiap orang.

Dalam upaya memahami berbagai masalah kesejarahan itu Proyek Pembinaan Kesadaran dan Penjernihan Sejarah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional menerbitkan hasil kegiatan yang dilaksanakannya selama ini berupa pelbagai wawasan pikiran yang pernah dikemukakan dalam pelbagai kertaskerja yang disampaikan pada pertemuan yang diadakan oleh Proyek Pembinaan Kesadaran dan Penjernihan Sejarah.

Di samping itu juga disertakan dalam publikasi ini hasil observasi di pelbagai tempat di seluruh propinsi di Indonesia; khususnya yang menyangkut buku teks yang digunakan di sekolah-sekolah tingkat SMP dan SMTA.

Mudah-mudahan publikasi ini akan berguna bagi masyarakat, sehingga pengetahuannya tentang masalah-masalah kesejarahan makin bertambah.

Kepada semua pihak yang telah memperlancar kegiatan-kegiatan Proyek Pembinaan Kesadaran dan Penjernihan Sejarah selama ini, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, Januari 1986

Pemimpin Proyek,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Drs. Anhar Gonggong', written in a cursive style.

Drs. Anhar Gonggong

Nip. 130321407.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYA- AN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
I. Sejarah Sebagai Ilmu, oleh: Prof.Dr. Haryati Soebadio	1
II. Pembinaan Kesadaran dan Penjernihan Sejarah, oleh: Dr. Taufik Abdullah	5
III. Kesadaran Sejarah Dalam Pengembangan Kebu- dayaan Nasional Indonesia, oleh: Dr. S. Budhisantoso	14
IV. Kesadaran Sejarah, oleh: Dr. Djoko Suryo	23
V. Pembinaan dan Kesadaran Sejarah, oleh: Ayatrohaedi	35
VI. Suatu Catatan Tentang Kesadaran Sejarah, oleh: Sutrisno Kutoyo	38
L a m p i r a n	50

SEJARAH SEBAGAI ILMU *)

Prof. Dr. Haryati Soebadio

Apabila kita perhatikan berbagai tanggapan masyarakat mengenai bidang sejarah dan pengajarannya, terutama bagaimana pengajaran itu diberikan di sekolah-sekolah, dan selanjutnya membaca laporan survai lapangan yang disajikan di sini, maka kesimpulannya tidak bisa lain, sebagai bangsa kita memang perlu sekali menangani pengajaran sejarah, dan khususnya sejarah bangsa, secara lebih memadai dan sungguh-sungguh yang terkait erat dengan kesadaran, penelitian, dan penjernihan sejarah. Dalam hal ini Pemerintah, yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang menterinya kebetulan sejarawan, sudah mulai mengadakan usaha cukup besar untuk menanggulangi masalah pengajaran sejarah yang kita rasakan kurang memuaskan itu. Namun, ijinlanlah saya dalam forum para ahli di sini, untuk mengingatkan dan menggarisbawahi bahwa masalah sejarah sebenarnya lebih mendalam dan lebih rumit daripada yang sepintas tampak dalam pengajaran sejarah di Indonesia.

Masalah yang berkenaan dengan dengan sejarah, sebagaimana diketahui, pada dasarnya sudah dapat ditunjuk pada kedudukan-

*) Sambutan Prof. Dr. Haryati Soebadio, Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

nya sebagai ilmu. Hal itu memang disebabkan oleh sifat sejarah itu sendiri. Dalam hal itu sejarah tidak berbeda nasib dengan seluruh kelompok ilmu yang kini dikenal sebagai ilmu-ilmu sosial budaya. Tidak ada salahnya jika kita renungkan kembali bagaimana keadaannya itu.

Kesulitan sudah akan mulai, apabila kita diminta memberikan definisi yang tangguh mengenai sejarah. Sebagaimana diketahui, kita langsung memasuki masalah dalam filsafatnya dan akhirnya memilih berbicara tentang hasil yang tampak, yaitu penulisannya. Dalam pada itu penulisan sejarah biasanya dihitung mulai dengan karya Herodotus, abad ke-5 SM. Namun, sampai masuk abad ke-20 sejarah belum mantap juga sebagai sejenis ilmu dalam pandangan masyarakat, termasuk dan terutama juga masyarakat ilmiah sendiri.

Sebabnya, pada mulanya yang dinilai sebagai ilmu, atau dengan istilah asing science, hanyalah ilmu eksakta dan alamiah. Kelompok ilmu seperti itu dianggap sebagai "ilmu murni", karena memiliki dalil dan hukum yang mutlak berlaku sehingga memungkinkan pembuktian dan kualifikasi objektif tanpa campur tangan manusia.

Bidang-bidang lain seperti bahasa, sastra, filsafat, termasuk juga sejarah, dianggap kurang pasti dan beraturan, karena menyangkut manusia serta kehidupannya. Bidang itu dinamakan "ilmu-ilmu kemanusiaan" atau *humaniora* dan di beberapa negara disebut *arts* (untuk kesenian dipakai *fine arts*). Namun, ketika kemudian ternyata bahwa ilmu-ilmu yang tadinya dinilai tidak pasti itu akhirnya dapat juga dikenakan berbagai peraturan, sekalipun bukan yang terlalu mutlak berlaku, timbul istilah *discipline*, mungkin karena dianggap masih "berdisiplin" ikut peraturan. Istilah itu pernah juga dipakai di Indonesia. Pada suatu ketika ilmu sejarah disebut "disiplin sejarah" di Fakultas Sastra, Universitas Indonesia. Kini kelompok ilmu bersangkutan umumnya dikenal dengan istilah ilmu-ilmu sosial-budaya (*socio-cultural*).

Walaupun demikian, tetap diketahui bahwa kelompok ilmu itu tidak mungkin dikenakan atau menghasilkan dalil dan hukum mutlak. Bidang studinya memang manusia dan peneliti pun manusia, sedangkan keadaan manusia selamanya banyak variabelnya.

Keadaan itu membawa konsekuensi yang seringkali tidak terlalu menguntungkan. Di satu sisi tetap ada anggapan "kurang" terhadap bidang ilmu sosial-budaya, baik dalam kalangan masyarakat luas maupun dalam dunia ilmiah sendiri. Di sisi lain, yang sebenarnya lebih parah, para sarjana bidang sosial-budaya sendiri acapkali merasa kurang pegangan pula, justru karena variabel yang sangat banyak itu. Kemudian, karena bidang sosial-budaya itu menyangkut kehidupan manusia, maka pihak awam yang tidak terdidik di bidangnya, bahkan yang sama sekali tidak menguasai bidang ilmu apa pun, tidak jarang mereka sanggup dan berhak ikut berbicara dan memberikan pendapat mengenai materi ilmu sosial-budaya. Dalam pada itu dilupakan perlunya ada keahlian dan pendidikan cukup dengan penguasaan teori yang diperlukan guna membicarakan segi ilmu. Memang kini sedang dibicarakan semacam "etika ilmiah" untuk menghadapi sikap masyarakat itu.

Khusus dalam bidang yang kita hadapi ini, bidang ilmu sejarah, sementara ini dapat dicatat banyak sekali dan berjenis-jenis pula teori yang beralih-alih timbul dan tenggelam kembali dan kini tidak jarang dimanfaatkan dalam kombinasi, di samping terdapat pula teori yang khusus lahir akibat pandangan politik tertentu. Demikianlah pula berbagai segi dalam ungkapan sejarah pada umumnya tetap memerlukan perhatian, seperti misalnya hubungan kausal, sebab-musabab antar peristiwa, kemungkinan objektivitas mutlak, kesahihan interpretasi, yang erat berhubungan juga dengan sejarah bangsa dan pemahamannya. Bagi Indonesia masih ada tambahan masalah khusus, yaitu bahwa penulisan atau pencatatan peristiwa, seperti yang dituntut ilmu sejarah, baru dikenal pada jaman sekarang ini. Dengan demikian perasaan terhadap sejarah, kesadaran sejarah,

juga masih merupakan hal yang baru, sedangkan pemahamannya tidak dapat diharapkan sudah dapat merata.

Sementara itu ilmu pengetahuan, baik di bidang eksakta-alamiah, maupun sosial-budaya, berkembang terus. Dalam kaitan ilmu sejarah, kini sudah disepakati berbagai patokan yang bisa digunakan secara merata dan di dunia ilmiah internasional sudah lazim. Namun, seperti umumnya di bidang sosial-budaya, setiap patokan perlu diperhatikan baik dasar pemikiran maupun kesulitan-kesulitan (variabel) yang ditimbulkannya.

Demikianlah yang diperlukan di Indonesia sekarang ini ialah penyuluhan ke dua arah, pertama-tama ke dalam guna para sejarawan sendiri, dan kedua ke luar untuk masyarakat luas. Di satu sisi, penyuluhan diperlukan guna memantapkan pengertian mengenai sejarah sebagai ilmu seperti yang kini berlaku. Sebagai ilmu, dengan sendirinya materi yang dihadapi perlu dikenakan penelitian tanpa hentinya, sedangkan sebagaimana dalam semua jenis ilmu, tergantung dari penemuan-penemuan sebagaimana pendapat mengenai berbagai segi materi ilmu bersangkutan berkembang. Dengan perkataan lain, sejarah mesti dipahami sebagai ilmu yang berkembang dan dapat mengalami perubahan. Pengertian itu dengan sendirinya akan menggairahkan penelitian lebih lanjut dan keinginan mencapai kemajuan di dalam ilmu dan lewat ilmu. Akibatnya dalam jangka panjang, di samping kesadaran sejarah juga kesadaran ilmiah bertambah. Kedua hal itu perlu berjalan berdampingan guna meningkatkan mutu para sejarawan dan ilmu sejarah di Indonesia.

Tugas sejarawan kemudian ialah mengadakan penyuluhan ke luar, kepada masyarakat luas. Dengan demikian masyarakat akan lebih paham akan hal-hal sejarah sebagai bidang ilmiah dan penerimaan sejarah dan pengajarannya akan dapat lebih berhasil. Jelas, bahwa peningkatan kemampuan sejarawan sebagai guru dan sebagai peneliti, dan peningkatan kemampuan masyarakat untuk menerima materi sejarah secara wajar, termasuk usaha pencerdasan bangsa sesuai dengan pengarahannya dalam Undang-undang Dasar 1945.

PEMBINAAN KESADARAN DAN PENJERNIHAN SEJARAH

Taufik Abdullah

Kalau kita perhtikan, sebenarnya ada dua corak kesadaran sejarah yang sekarang masih dalam proses peralihan yaitu kesadaran yang bersifat etnis, dan yang bersifat nasional.

Pertama, yang bertolak dari *regional concept of history* yang bersifat etnis-kultural. Dalam hal ini, maka kita melihat tidak hanya satu atau dua corak kesadaran sejarah, akan tetapi banyak. Kesemuanya merupakan unsur dari setiap komunitas (lokal atau nasional) dalam merumuskan identitasnya, dan memberi arti terhadap pengalaman di masa lalu, serta merupakan visi bagi masa depan. Dalam pergaulan bangsa, yang melampaui ikatan komunitas lokal, maka tidaklah mengherankan jika terjadi perbenturan antara berbagai corak kesadaran sejarah itu.

Ambilah Arupalaka, misalnya. Dalam konteks Indonesia —jadi dalam pandangan serta kesadaran sejarah komunitas nasional—, Arupalaka adalah orang yang membantu Belanda melawan Hasanuddin. Tetapi dalam konteks sejarah Sulawesi Selatan, masalahnya jauh lebih sukar. Dalam konteks Indonesia masalahnya mudah, sebab yang melawan Belanda dan akhirnya

terpaksa menerima perjanjian Bongaya itu adalah Hasanuddin. Sedangkan Arupalaka adalah orang yang datang dari belakang untuk menyerbu Goa-Tallo. Dan bukanlah perlawanan terhadap penetrasi dan kekuasaan kolonial merupakan unsur kesamaan pengalaman historis dari komunitas-komunitas lokal dan karenanya menjadi bagian dari kesadaran nasional. Tetapi dalam konteks sejarah Sulawesi Selatan, Arupalaka adalah putramahkota Bone yang ingin membebaskan kerajaannya dari dominasi Goa-Tallo. Jadi ia berbuat sesuai dengan tugas kultural yang telah dilimpahkan pada dirinya. Keengganan orang Bandung untuk menamakan salah satu jalannya dengan nama Gajah Mada, dan keengganan orang Yogyakarta untuk menamakan salah satu jalannya dengan nama Pajajaran, adalah contoh yang menarik juga betapa kesadaran sejarah yang bersifat lokal bisa saling meniadakan. Dalam hal ini yang dipentingkan ialah *fairness* kewajaran kultural, demi terbinanya integritas sosial dan kontinuitas kultural dari komunitas ethnics.

Kedua, konsep kesadaran sejarah yang bersifat nasional yang sedang bertumbuh dan ditumbuhkan. Maka kitapun berhadapan dengan dunia baru, yang di satu pihak menjalin hubungan yang bersifat antar-lokal, tetapi di lain pihak menjadikan kesadaran lokal *irrelevant*. Dalam kaitan inilah berbagai corak inkorporasi nilai terjadi dan transformasi pahlawan lokal menjadi nasional terwujud. Dalam hal ini pula kesamaan pengalaman historis, seperti perlawanan terhadap kekuasaan asing, tidak saja menjadi unsur perasaan senasib, tetapi juga dasar pembentukan kesadaran sejarah yang bersifat nasional.

Masalah kesadaran sejarah tentu masih bisa diteruskan, tetapi baiklah diadakan lebih dulu identifikasi aktivitas yang disebut "penjernihan sejarah" itu. Secara teknis ada empat corak penjernihan.

Pertama, penjernihan ditujukan kepada rekonstruksi yang berantakan, yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya adalah buku *Rekonstruksi Sejarah Indonesia*. Dalam buku itu

disebutkan bahwa kerajaan Sriwijaya itu letaknya tidak di Palembang, atau di Jambi, akan tetapi di Kalimantan Barat. Masalahnya ialah pemakaian sumber yang tak beres.

Kedua, mengisi kekosongan dalam pengetahuan sejarah, karena kekurangan atau ketiadaan sumber informasi. Dalam suatu buku misalnya tidak dikatakan bahwa ada satu peristiwa yang secara simbolik cukup penting dalam sejarah revolusi yaitu Rapat Besar Ikada. Buku tersebut loncat saja dari 17 Agustus 1945, 18 Agustus 1945, ke 5 Oktober 1945. Padahal ada peristiwa penting di bulan September yang cukup penting.

Ketiga, penjernihan terhadap mithologisasi dan ideologisasi yang telah terjadi terhadap sejarah. Hal ini muncul ketika hasrat untuk mendapatkan pegangan dari sejarah telah menemui jalan buntu, sehingga sengaja atau tidak "sesuatu yang diinginkan terjadi telah menjadi betul-betul terjadi di masa lalu".

Keempat, penjernihan untuk mengembalikan peristiwa di kelampauan dalam konteks sejarahnya. Dengan kata lain suatu peristiwa haruslah bisa dimengerti dari logika struktur sosial-kultural yang menjadi wadahnya sendiri. Dengan ancap-ancang pemikiran ini, maka saya melihat ada 3 sasaran yang bisa dikerjakan secara praktis dalam usaha penjernihan sejarah, yaitu : Pertama, tentu saja, penyelesaian hal-hal yang menyangkut pertanyaan-pertanyaan "elementer" sejarah, yaitu yang berkaitan dengan apa, siapa, di mana, dan apabila. Kita tahu akan sesuatu tetapi tidak jelas siapa yang terlibat di dalamnya dan ragu-ragu di mana hal itu terjadi, dan betul-betul kehilangan akal kalau tidak di tanya itu apabila terjadinya. Siapapun tahu bahwa ada kerajaan besar yang bernama Sriwijaya, akan tetapi kitapun tahu juga bahwa perdebatan, yang kadang-kadang lucu, masih terjadi tentang lokasi Sriwijaya itu. Adanya dinasti Cailendra tak diragukan lagi, tetapi di manakah Cailendra itu benar-benar berada; apakah di Jawa atau di Sriwijaya, atau bagaimana?. Jadi masalah ketepatan "*elements of history*" ini perlu diperhatikan Proyek Penjernihan. Barangnya diketahui, tempat tidak; saatnya diketahui, apanya tidak dikenal.

Kedua, tidak semua peristiwa sejarah akan kita temukan sumbernya, maka orangpun akan berbicara tentang *inferences*; ketika berbagai sumber tak langsung dipakai sebagai pengisi kekosongan. Tak salah memang, tetapi kapankah *inferences* itu bisa dianggap sah?.

Ketiga, menyangkut masalah anakronisme, yaitu kekacauan dalam dimensi waktu, baik dalam kesadaran, maupun dalam rekonstruksi peristiwa.

Ada beberapa corak anakronisme yang biasa kelihatan :

Pertama, anakronisme sederhana, ketika rekonstruksi "meniadakan" aspek kronologi dari sejarah. Seperti misalnya *Hikayat Hang Tuah*. Hang Tuah bisa bercanda dengan Gajah Mada. Itu kan kacau waktunya. Dan ini bukan terdapat dalam hikayat saja, tetapi juga di dalam penulisan sejarah modern.

Kedua, anakronisme yang melihat pada peristiwa di kelampauan dari ukuran nilai yang sekarang dianut. Jadi sejarah dipisahkan dari konteks kesejarahannya. Misalnya Trotzky pernah hebat sebagai tangan kanan Lenin. Tetapi ketika Stalin berkuasa, Trotzky bukan hanya hilang, tetapi dibunuh. Itu pembunuhan yang kedua kalinya. Di samping dibunuh di Mexico, ia juga dibunuh dalam sejarah. Mengapa?. Karena ukuran Stalin yang paling menentukan.

Ketiga, yang lebih halus adalah kecenderungan teleologis, seakan-akan peristiwa atau tokoh yang telah diberi makna berdasarkan nilai sekarang telah menampakkan tanda-tandanya dari sejak dulu. Jadi kita melihat sejarah berdasarkan interpretasi kita terhadap hari sekarang. Buku-buku biografi dan bahkan sejarah perjuangan bangsa sering terjebak oleh kecenderungan ini. "Sebagai seorang pahlawan, ia melakukan hal ini". Kalimat yang kelihatannya sederhana ini adalah contoh pemikiran – teleologis seakan-akan sudah sejak awal tokoh tersebut adalah "pahlawan".

Kalau membicarakan *elements of history* kita sangat memerlukan tinjauan yang mendalam tentang sumber-sumber,

sikap kritis terhadap sumber dan kemampuan teknis untuk mengerti sumber atau bila perlu, mengisi *inferences* itu. Dalam masalah anakronisme maka di samping hal-hal ini semua, diperlukan juga semacam kesadaran teori yang tinggi. Namun masalah yang pelik dari penjernihan sejarah ialah dalam berhadapan dengan sejarah yang bersifat normatif. Dalam *normative history* yang penting adalah pencapaian hasrat-hasrat normatif, bukannya ketepatan uraian sejarah secara faktual. Ada dua hal yang biasanya terlupakan dalam penulisan sejarah yang bersifat normatif ini. Pertama, *structure of reality*, dalam mana peristiwa-peristiwa sejarah itu terjadi. Jadi struktur sosial politik-ekonomi, yang merupakan wadah dari peristiwa-peristiwa itu adalah peristiwa mitologis yang tanpa wadah dan tanpa waktu. Kelemahan kedua, ketiadaan atau kekurangan perhatian terhadap logika peristiwa. Sejarah normatif yang mempunyai pretensi sebagai wakil "realitas" cenderung memisahkan realitas dengan logika — seakan-akan dalam rekonstruksi sejarah logika tak mempunyai peran. Akibatnya apa yang kita temukan dalam *normative history* adalah segala macam keterangan-sejarah atau *historical explanation* tergelincir pada dua corak *fallacies*, yakni:

Pertama, seakan-akan aktor sejarah mempunyai kebebasan total dalam melakukan sesuatu. Mengapa ia berontak?. Karena ia ingin berontak. Jadi seakan-akan manusia adalah the real maker of history. Motif individu menjadi serba menentukan. Dan motif itu tak lain daripada nilai-nilai yang telah dilekatkan pada aktor sejarah.

Kedua, segala *outcome* sejarah diterangkan dengan mengembalikannya kepada sebab-sebab ideologis. Apakah sebabnya PRRI bisa tumpas? Karena keunggulan Pancasila! Hal ini dalam soal normatif bagus, hanya kita kehilangan *the wisdom of history*. Lebih penting lagi, hal ini menunjukkan pula betapa sejarah diterangkan dari sudut *metahistoris*, hal — yang — di belakang sejarah. Motif individu itu di manapun juga ada, tetapi individu dalam berbuat tidaklah mempunyai kebebasan yang total. Setiap orang yang belajar sedikit tentang teori dan filsafat

sejarah akan menyadari bahwa dalam sejarah selalu ada ketegangan, antara hasrat kebebasan dalam memilih tindakan dengan ikatan-ikatan struktural, yang membatasi kebebasan itu.

Tadi malam atau kapan saja pun saya akan mengatakan bahwa sejarah pada dasarnya bersifat selektif. Tidak ada sejarah tanpa seleksi. Seleksinya tentu saja ditentukan oleh konsep tentang apakah yang *penting* dan apakah yang *relevan*. Apakah yang penting dan apakah yang relevan itu ditentukan oleh suatu *pertanyaan pokok*. Saya sering katakan bahwa fakta sejarah itu baru ada setelah pertanyaan diajukan. Tanpa adanya pertanyaan tak ada fakta yang akan ditemukan atau kalau tidak hanyalah belantara fakta tanpa tepi yang akan dihadapi. Pertanyaan bertolak, atau berasal dari, *intelektual concern*, dari suatu keprihatinan intelektual, ketika seorang sejarawan atau pemberi order penelitian sejarah tergugah tentang sesuatu hal. Dan ketergugahan ini sifatnya murni subyektif. Jadi mulai dari suatu *concern* maka suatu pertanyaan yang dirumuskan dan pertanyaan itulah yang menjadi ukuran dalam seleksi *significance* dan mana yang penting dan mana pula hanyalah embel-embel saja. Dalam seleksi itu ada dua hal yang ikut berpengaruh, yakni: pengetahuan teoritis terhadap struktur atau wadah, dan pengetahuan tentang logika situasi yang berkembang.

Jika dalam pengerjaan rekonstruksi sejarah saja kita telah melakukan seleksi, maka pembentukan kesadaran sejarah sangat selektif sekali. Jika sejarah *empiris* sesuatu yang tak bisa diabaikan atau diadakan berdasarkan selera telah bersifat selektif, apalagi kesadaran sejarah yang menyangkut realitas batiniah. Kesadaran sejarah merupakan bagian dari konsensus sosial. Peristiwa-peristiwa yang masuk dalam kesadaran, yang telah diolah sistem nilai, akhirnya menjadi dasar pandangan kesejarah-an. Dari pandangan inilah suatu peristiwa dianggap bermakna, *meaningful*. Suatu peristiwa dijadikan simbol atau sesuatu yang bermakna bagi integrasi komunitas dan kontinuitas kultural, bahkan biasanya juga, integrasi nasional. Maka tidaklah mengherankan suatu peristiwa penting yang tak berarti dalam konteks

sejarah empiris, bisa menjadi serba bermakna dalam kesadaran. Dengan kata lain peristiwa kecil tersebut telah terungkap dari situasi historisnya, tetapi telah menjadi bagian dari kesadaran.

Pokok masalah kita sekarang adalah kesadaran dan penjernihan sejarah. Dalam hal ini kemungkinan terjadi semacam perbenturan antara proses penjernihan dengan corak kesadaran yang telah dihayati bisa terjadi. Kemungkinan perbenturan kedua ialah ketika berbagai jenis kesadaran sejarah lokal berbenturan dengan kesadaran sejarah yang bersifat nasional.

Jadi pertama kita menghadapi konflik antara *fairness* dengan *truth*, antara makna yang menjadi dasar kesadaran sejarah dengan keharusan yang mesti dikerjakan oleh usaha penjernihan. Tadi malam diajukan tentang "surat-surat Bung Karno". Itu adalah contoh dari kemungkinan konflik antara *fairness* dengan *historical truth*. Kebenaran atau kepastian historisitas memang sering menggugah kemantapan yang telah dipelihara. Kepastian atau *certainly* sering berfungsi sebagai faktor demitologisasi, sedang mitos adalah salah satu unsur integrasi sosial. Sebab itulah, saya kira dalam hal ini sebaiknya kita bertolak dari yang paling sederhana. Hal yang pertama yang kita inginkan sesungguhnya adalah kesadaran yang berdasarkan suatu kebenaran. Kewajaran yang bertolak dari mitologi. Mengapa kita inginkan hal ini?. Karena sejarah bukan saja memberikan makna, *meaning*, tapi juga memberikan kearifan, wisdom. Tidaklah hanya sesuatu yang "afektif" itu mempengaruhi gerak laku, tetapi juga pengetahuan tentang bagaimana orang merintis hari depannya, maka dalam hal ini diperlukan pengetahuan yang mendalam tentang interaksi antar manusia dengan lingkungannya dan sesamanya. Tidak bisa kita berlarut hanya sibuk dengan segala hal yang "afektif-afektif" saja. "Afektif-afektif" itu hanya melarutkan kita dalam dunia mimpi. Sebab itu sejarah yang berdasarkan *cognition* yang bisa dipertanggungjawabkan dari sudut ketetapan historitas yang ilmiah, adalah suatu keharusan juga. *Fairness*, dalam masyarakat adalah suatu keharusan. Tanpa adanya *fairness*, maka integritas

sosial bisa goyah. Tetapi *fairness* tidak hanya berhenti pada kewajaran. Sebab itu *fairness*, semestinya didampingi oleh *the mansion of truth*. Hal ini berarti adanya keharusan untuk mengadakan pengujian yang terus menerus terhadap pengetahuan sejarah.

Kalau kita ingin merintis hari depan, disamping menjaga integritas sosial, yang menekankan dimensi kewajaran dari sejarah, maka dimensi kebenaran atau *truth* yang bisa diuji secara ilmu sejarah itu adalah suatu keharusan. Sejarah yang murni normatif hanya akan menina bobokan kita, karena suatu waktu dunia yang "wajar" itu bisa goncang. Maka krisis hebat bisa terjadi. Dan, tidaklah diperlukan seorang ahli sejarah untuk mengingatkan kita betapa keterpakuan pada segala hal yang normatif, yang tentu saja ideologis sifatnya, menyebabkan kita tergelincir dalam krisis yang bahkan menjadikan integritas nasional jadi taruhan.

Jadi apakah program yang sebaiknya dirintis oleh Proyek baru ini?. Tentu saja banyak, tetapi ada 3 hal yang teringat pada saya.

Pertama, proyek ini sebaiknya bertolak dari apa yang telah ada; tidak perlu mencari-cari apa yang perlu dijernihkan. Baiklah ditinjau saja *textbooks* dari SD, SMP, SMA. Apakah dari sudut penjernihan sejarah buku-buku tersebut telah beres atau belum?. Sebab kesadaran sejarah normatif yang mengingkari realitas historis itu juga merusak juga akhirnya. Apakah fakta-fakta yang diberikan adalah hal-hal yang telah lulus?. Dalam pengujian fakta?. Apakah fakta-fakta tersebut telah merupakan *accepted history* atau masih bersifat perdebatan atau, bahkan palsu.

Kedua, apakah arti peristiwa atau tokoh sejarah yang dipakai sebagai nama jalan atau gedung yang mengandung makna sejarah tetapi mempunyai makna lain?. Misalnya pemakaian tokoh untuk nama jalan. Apakah maksudnya?. Tetapi lebih penting, bagaimana isi yang telah diberikan terhadap nama-nama itu semua?.

Ketiga, kita ingin tahu *divergence historical consciousness*, maka barangkali ada baiknya diteliti simbol-simbol daerah – dari tingkat kabupaten sampai propinsi. Dari studi ini akan kelihatan bagaimana daerah-daerah itu merumuskan dirinya.

Dalam aspek kesadaran sejarah, maka masalah kita sesungguhnya tidaklah sekedar mengetahui dan memahami kesadaran sejarah yang bersifat lokal, tetapi juga membimbing kearah pendalaman sejarah nasional. Hal ini tidak bisa dilaksanakan tanpa pemahaman terhadap keseragaman kesadaran nasional yang bersifat lokal itu.

KESADARAN SEJARAH DALAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN NASIONAL INDONESIA

Dr. S. Budhisantoso

Margaret Mead (1978) mengemukakan tiga tipe budaya berdasarkan cara pembinaannya, yaitu budaya *postfigurative*, *cofigurative*, dan *prefigurative*. Kebudayaan tipe *postfigurative* ialah kebudayaan yang perkembangannya di masa mendatang merupakan pengulangan kebudayaan yang lalu. Kebudayaan-kebudayaan yang masih sederhana (teknologinya) biasanya mengalami perkembangan yang lamban. Orang-orang tua merupakan sumber kebijaksanaan dan menyampaikan pengetahuan mereka kepada generasi muda sebagai ahli waris sehingga masa lampau generasi tua merupakan masa depan generasi muda. Kehidupan generasi sebelumnya merupakan landasan berpijak bagi generasi selanjutnya; oleh karena itu hari depan anak-anak dibina sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dialami oleh generasi sebelumnya akan menjadi pengalaman generasi penerus apabila mereka sudah dewasa.

Orang-orang tua tidak mampu menciptakan perubahan, dan karena itu apa yang dapat disampaikan kepada generasi penerus ialah keyakinan mereka akan kesinambungan yang ti-

dak pernah berubah sejak awal peradaban manusia sehingga masa kini. Setiap perubahan, kalau ada, harus diserap ke dalam khazanah budaya yang telah ada, dan dihimpun dalam ingatan dan pola-pola tingkah-laku orang-orang tua dari generasi ke generasi berikutnya tanpa catatan tertulis atau peringatan yang monumental. Karena itu pula tidak ada alasan bagi anak-anak untuk mempersoalkan apa yang dianggap baik dan benar oleh orang-tua mereka. Sejak kecil anak-anak sudah dididik oleh orangtua mereka tanpa kesempatan untuk mengubah "nasib" atau mengembangkan pilihan hidup kecuali menerima apa yang ditanamkan kepada mereka.

Apa yang dapat mengubah keadaan yang seolah-olah membeku ialah kekuatan luar seperti bencana alam atau penindasan oleh orang asing, sedangkan kontak-kontak dengan dunia luar belum tentu membawa perubahan karena kuatnya kebanggaan diri atau kelompoknya yang mempunyai ciri-ciri tersendiri akan bertambah kuat apabila dihadapkan pada hal yang asing. Kuatnya pendidikan budaya yang mengokoh dalam masyarakat mempersulit orang menerima pengaruh dari luar, apalagi kalau tidak jelas dapat diserap ke dalam sistem budayanya yang amat kuat menguasai kehidupan sosial mereka.

Ciri-ciri masyarakat yang berbudaya tipe *postfigurative* ialah:

1. Keyakinan orangtua bahwa cara hidup mereka tidak berubah dan bersifat kekal. "Tak lapuk oleh hujan dan tak lekang oleh panas".
2. Sangat kuat terkait pada lingkungan pendukungnya berasal, dibesarkan, dan dibiasakan secara aktif.
3. Kelangsungan budaya itu sangat tergantung pada kehadiran sekurang-kurangnya tiga generasi pendukungnya sehingga pengetahuan budaya dapat ditanamkan secara langsung melalui praktek kehidupan sehari-hari. Kakek dan nenek merupakan sumber kebenaran bagi bapak dan ibu yang akan menyampaikan pengetahuan budaya mereka

kepada anak-anak mereka, Di lain pihak anak-anak akan berkiblat kepada kakek dan nenek dalam membina kepribadiannya dan belajar hidup langsung dari orangtua mereka.

Kebudayaan-kebudayaan Indonesia, atau yang dalam penjelasan pasal 32 UUD 1945 disebut sebagai *kebudayaan daerah*, pada hakikatnya dapat dikelompokkan ke dalam budaya *post-figurative*. Orang-orang tua masih sangat membanggakan kebudayaan suku bangsa atau daerah asal mereka sebagai suatu sistem budaya yang terbaik dan tak mungkin berubah oleh perkembangan zaman. Kalaupun kini harus menghadapi kenyataan, orang-orang tua itu belum dapat melupakan impian masa jaya kebudayaan mereka di masa lampau. Tidaklah mengherankan kalau usaha pemerintah untuk menggali, mengungkapkan, dan menawarkan berbagai pilihan budaya daerah dalam rangka memperkembangkan kebudayaan nasional Indonesia, mendapat sambutan yang berlebihan dari generasi tua pendukung kebudayaan-kebudayaan Indonesia termaksud.

Kebudayaan-kebudayaan Indonesia yang masih kuat terkait dengan daerah asal para pendukungnya, hidup sekurang-kurangnya 20 generasi sekalipun wilayah pemukiman itu terpenjar-penjar. Kebudayaan orang Bali selalu dikaitkan dengan pulau Bali sebagai pusat asal berkembangnya. Kebudayaan Bugis dan Makasar, selalu mengingatkan kita pada tanah asal sebagai pusat perkembangannya yaitu di Sulawesi Selatan yang sebagian terbesar pendukungnya masih berada. Demikian pula kebudayaan Sunda yang dikaitkan dengan tanah asalnya Priangan di Jawa Barat. Tidaklah mengherankan kalau kebanyakan transmigran spontan dan transmigrasi resmi merindukan tanah asalnya setiap waktu, sekalipun ia sudah berhasil di tempat yang baru. Demikian pula para perantau itu cenderung untuk membentuk komuniti-komuniti seasal daerah kebudayaan dalam rangka mewujudkan rasa rindu secara kuatnya ikatan batin kampung halaman asal mereka.

Kelangsungan kebudayaan-kebudayaan Indonesia jelas amat tergantung pada keberadaan generasi pendukung di mana pun mereka berada. Generasi kakek-nenek dewasa ini merupakan sumber informasi dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan kebudayaan suku bangsa atau daerah. Di tangan merekalah sesungguhnya pendidikan budaya sukubangsa dan daerah di Indonesia terselenggara. Betapa besar peranan mereka dalam pendidikan budaya kebudayaan Indonesia tercermin dari masih kuatnya nilai-nilai norma sosial atau pandangan hidup yang menguasai kehidupan baik kerabat batih maupun kerabat luas. Sopan santun pergaulan, istilah kekerabatan, serta hak dan kewajiban dalam keluarga pada masyarakat Indonesia masih kuat dikuasai oleh kebudayaan Indonesia yang berlaku dalam lingkungan masyarakat sukubangsa atau daerah.

Keterlibatan penduduk Indonesia dalam pergaulan antar-sukubangsa di kota-kota besar menimbulkan berbagai kesulitan yang tidak disadari oleh karena kurangnya pengetahuan budaya sebagai pedoman bagi sikap dan polah tingkah-laku di luar lingkungan masyarakat sukubangsa. Demikian pula penghayatan kebudayaan sukubangsa di antara generasi juga dirasa sangat lemah, antara lain juga karena kurang lengkapnya komponen pendukung kebudayaan tipe *postfigurative*. Pola penempat neo-lokal serta perpindahan penduduk ke kota-kota besar telah mengembangkan pola pemukiman dan perumahan yang menampung keluarga batih saja dan memutuskan hubungan kerabat tiga generasi yang diperlukan dalam pembinaan budaya *postfigurative*. Anak-anak kehilangan pembandingan dan sumber kebijaksanaan budaya untuk menguji kebenaran informasi budaya yang mereka peroleh dari orangtua mereka, karena ketidakhadiran kakek dan nenek dalam keluarga sebagai panutan. Akibatnya dapat kita rasakan dan dengarkan sebagaimana tersimpul dalam keluhan sementara tua-tua adat yang menyatakan kekhawatiran mereka tentang lemahnya kesadaran berkebudayaan di kalangan generasi muda.

Sesungguhnya di samping gejala kebudayaan-kebudayaan *postfigurative* dengan segala kendala dan pendorongnya, di Indonesia kini sedang berkembang kebudayaan nasional yang menunjukkan ciri-ciri *cofigurative*. Budaya *cofigurative*, menurut M. Mead merupakan kebudayaan yang berlaku sebagai pedoman hidup masa kini dan harapan di masa mendatang. Bagi anggota masyarakat, kebudayaan mereka di masa mendatang adalah model tindakan tingkah-laku yang berlaku pada masa kini. Akan tetapi sebagaimana ditekankan oleh M. Mead, tidak banyak masyarakat di dunia ini yang semata-mata melestarikan budaya *cofigurative* dalam beberapa generasi. Meskipun dalam masyarakat pendukung budaya *cofigurative* ada anggapan bahwa setiap generasi akan mengembangkan budayanya yang berbeda dengan budaya sebelumnya, orang-orang tua masih berperan dalam meletakkan gaya dan pembatasan pengembangan budaya sebagaimana diungkapkan dalam pola tingkah-laku generasi muda.

Persetujuan generasi tua terhadap pembaruan budaya masih diperlukan, walaupun kemungkinan generasi muda akan mengembangkan pola-pola tingkah-laku yang berbeda dengan yang telah ada untuk membedakan diri dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu budaya *cofigurative* dapat dianggap sebagai awal kehancuran budaya *postfigurative*.

Biasanya budaya *cofigurative* itu berkembang karena:

1. Bencana alam yang menyingkapkan orang-orang tua sebagai pimpinan yang tangguh.
2. Perkembangan teknologi tinggi yang tidak dikuasai oleh generasi tua.
3. Perpindahan penduduk ke lain tempat yang mengakibatkan orangtua dianggap pendatang baru atau orang asing dalam masyarakat setempat.
4. Kekalahan perang dan tekanan untuk mengambil alih bahasa dan kebudayaan pemenang.

5. Perubahan penghayatan agama ketika orangtua memaksa anak-anaknya menganut agama baru yang tidak pernah mereka alami semasa muda.
6. Tindakan berencana sebagai hasil atau merupakan revolusi yang ingin memperkenalkan gaya hidup baru kepada generasi.

Proklamasi Kemerdekaan RI 17-8-1945 pada hakikatnya diartikan sebagai tindakan berencana yang tidak terbatas pada usaha pembebasan diri dari penjajahan, melainkan meliputi seluruh sektor kehidupan sosial budaya. Oleh karena itu UUD 1945 dengan tegas menyatakan perlunya pemerintah mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia. Walaupun dalam penjelasannya disebutkan bahwa kebudayaan lama dan asli yang terdapat di daerah-daerah termasuk kebudayaan nasional Indonesia, para pendiri negara itu menyadari perlunya kerangka acuan yang bersifat dan berlaku secara nasional. Ini berarti kita harus mengembangkan budaya baru, seperti apa yang dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 32 UUD 1945.

Pengembangan kebudayaan nasional Indonesia tidak dapat bertumpu pada budaya *postfigurative* semata karena masyarakat Indonesia yang terwujud sejak Proklamasi adalah masyarakat majemuk yang memerlukan kerangka acuan yang dapat menjembatani pergaulan antar suku, golongan agama, dan lain-lain anggota masyarakat yang mempunyai latar-belakang budaya yang beragam. Belum lagi terhitung keperluan kerangka acuan yang memadai dengan perkembangan masyarakat dan perubahan lingkungan dalam arti luas sehingga banyak hal baru harus dikembangkan dalam kebudayaan nasional.

Pembangunan yang pada hakikatnya merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan rohani dan jasmani, mendorong masyarakat Indonesia untuk mengambil alih ilmu dan teknologi yang tidak dikuasai oleh generasi sebelumnya. Hal ini mendorong masyarakat Indonesia untuk mengembangkan nilai-nilai, norma-norma, dan sistem idea yang belum tentu ada dalam

khasanah budaya generasi sebelumnya. Kebutuhan akan pedoman bagi pola tingkah-laku yang baru makin mendesak mengingat kemajuan teknologi, khususnya di bidang pengangkutan dan perhubungan, memungkinkan orang tukar-menukar pengetahuan, pemikiran, dan pengalaman sehingga mempercepat perkembangan kebudayaan yang bersangkutan. Pengalaman-pengalaman baru ini belum tentu dialami oleh generasi sebelumnya di masa muda sehingga tidak mudah bagi mereka untuk menanamkan budaya kepada anak-anak mereka dengan sepenuhnya serta sesuai dengan kebutuhan akan pengetahuan budaya yang baru. Akibatnya generasi muda kini cenderung untuk belajar dari sesama teman atau sesama angkatan dalam menghadapi tantangan baru dan mengembangkan cara serta tanggapan yang lebih sesuai dengan perkembangan jaman.

Kemajuan teknologi juga telah meningkatkan perpindahan dan persebaran penduduk di luar lingkungan kebudayaan asal mereka. Banyak di antara orang-orang yang berpindah tempat tinggal itu diperlakukan sebagai pendatang baru atau orang asing oleh masyarakat penerima. Akibatnya orang-orang tua itu kurang mempunyai kemampuan untuk menanamkan pengetahuan budaya kepada anak-anak mereka sendiri yang justru cenderung untuk mengambil alih pengetahuan budaya masyarakat setempat dalam usaha mereka beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Di samping itu kepindahan penduduk ke tempat yang baru telah ikut serta mematahkan peranan pendidikan generasi kakek dan nenek di kalangan generasi muda. Anak-anak yang dibesarkan di tempat pemukiman yang baru tidak dapat lagi menikmati pendidikan dari kakek dan nenek mereka yang ditinggalkan di kampung halaman, karena kecenderungan pembatihan dalam membina rumahtangga di tempat yang baru. Anak-anak dalam keluarga batih kehilangan panutan budaya dan pembanding yang penting – seorang nenek – sedangkan ibu sibuk dengan pekerjaan mencari nafkah dan terpaksa menyesuaikan diri dengan budaya di tempat-tempat kerja mereka.

Kenyataan sosial budaya ini tidak dapat dihindarkan, apalagi karena dalam masa pembangunan ini Pemerintah secara sadar ingin mengembangkan dan menanamkan sejumlah nilai baru seperti nilai yang mengutamakan *achievement*. Sementara itu pengembangan kebudayaan nasional Indonesia diharapkan tidak terlepas dari akarnya, yaitu yang berlandaskan puncak-puncak kebudayaan yang terdapat di daerah-daerah serta sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Kenyataan tersebut mendorong pemerintah untuk mengembangkan dan menggiatkan pendidikan budaya bangsa melalui berbagai pendidikan formal dan nonformal. Di antara pendidikan budaya yang amat penting artinya ialah pembinaan kesadaran sejarah.

Kesadaran sejarah itu penting dalam pembinaan budaya bangsa karena memerlukan dukungan dan peran serta secara aktif segenap anggota masyarakat. Untuk menggerakkan peranan serta segenap anggota masyarakat dalam membina dan memperkembangkan kebudayaan nasional perlu dibangkitkan kesadaran bahwa mereka itu merupakan satu kesatuan sosial yang terwujud melalui proses sejarah yang akhirnya mempersatukan sejumlah nasion kecil dalam satu nasion Indonesia. Kesadaran sejarah sebagai satu bangsa itulah yang perlu dibina dan disebarluaskan kepada segenap anggota masyarakat Indonesia di mana pun mereka berada guna memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam mengembangkan kebudayaan nasional.

Kesadaran sejarah juga penting artinya karena bukan hanya mempersoalkan asal-usul yang memperkuat perasaan yang dapat mempertajam pandangan ke dalam dan ke luar kesatuan sosialnya, tetapi ia juga penting untuk memperkuat dorongan mencapai cita-cita bersama setelah belajar dari pengalaman di masa lampau.

Mengingat arah dan tujuan pengembangan kebudayaan nasional Indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, pembinaan kesadaran sejarah masyarakat harus dilakukan bukan

sekedar memperluas pengetahuan, melainkan sejauh mungkin juga dapat membantu penghayatan nilai-nilai budaya yang relevan dengan usaha pengembangan kebudayaan nasional itu sendiri.

Oleh karena itu, kesadaran sejarah baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat luas diarahkan kepada penghayatan nilai luhur, khususnya nilai-nilai perjuangan yang mempersatukan masyarakat Indonesia yang majemuk sebagai satu bangsa, serta untuk merangsang pengembangan daya cipta, rasa, dan karsa segenap anggota masyarakat dalam mengembangkan kebudayaan nasional.

Kesadaran sejarah sebagai satu bangsa itu dapat berfungsi sebagai pengikat dan pengarah pengembangan kebudayaan nasional Indonesia yang tidak hanya bertumpu pada apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang pendahulu bangsa Indonesia, melainkan juga senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan pembaruan lingkungan. Dengan demikian maka kebudayaan nasional Indonesia yang kita kembangkan sesuai dengan Penjelmaan Pasal 32 UUD 1945 merupakan perwujudan upaya aktif masyarakat pendukungnya yang berpijak pada pengalaman masa lampau, menghadapi tantangan masa kini dan merencanakan hari depan dengan lebih seksama.

KESADARAN SEJARAH

Dr. Djoko Suryo

Ada enam butir dalam pembicaraan ini, ialah:

1. Masalah kesadaran sejarah dalam hubungan dengan tujuan-tujuan praktis;
2. Masalah pengertian kesinambungan sejarah, yaitu masa lampau, masa sekarang, dan masa depan, yang tidak lepas dari masa yang bertopang pada pengertian masa kini tidak lepas pada masa lampau;
3. Masalah yang berhubungan dengan konsepsi, berhubungan dengan prespektif waktu;
4. Kesadaran sejarah dalam hubungannya dengan kehidupan manusia dan perkembangan sejarah di Indonesia.
5. Masalah yang berhubungan dengan pendekatan sejarah Indonesia, yaitu suatu persoalan yang bersifat problem teoritis metodologis; dan
6. Butir-butir rekomendasi.

1. Masalah Kesadaran Sejarah

Pembahasan mengenai sejarah atau kesadaran sejarah pada dasarnya merupakan masalah pragmatis baik yang merupakan

dasar kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa, maupun yang berhubungan dengan masalah pendidikan atau tujuan lain yang sesuai.

Masalah kesadaran sejarah sesungguhnya dapat dibahas banyak sekali, baik yang menyangkut bidang teori, yaitu lingkungan yang berkenaan dengan masalah filsafat atau masalah yang berkisar kepada teori dan metodologis, maupun dalam hubungannya dengan masalah kemampuan orang seseorang dalam menghubungkan kontak dengan situasi lingkungan yang bersifat temporal atau historis. Setidak-tidaknya dapat ditambahkan bahwa sesungguhnya kesadaran sejarah merupakan satu dimensi historis; di situ terdapat konsepsi waktu yang sesungguhnya hanya dimiliki oleh manusia yang berbudaya, karena hanya manusia yang berbudaya lah sesungguhnya yang mengenai waktu, baik waktu yang obyektif maupun subyektif.

Waktu obyektif ialah waktu yang bisa disadari bersama, diakui oleh orang lain subyektif mungkin bersifat internal dan dipengaruhi oleh emosi, waktu yang menghubungkan saat terjadinya suatu peristiwa dengan peristiwa lain yang tidak hanya dialami seseorang, tetapi dialami orang lain secara obyektif, artinya terdapat di dalam konsepsi kesadaran waktu.

Kesadaran sejarah sesungguhnya bisa dialami secara perseorangan, yang tercermin dalam memori dan sebagainya. Dalam hubungan itu yang lebih penting ialah kesadaran sejarah yang bersifat kolektif, yaitu satu bentuk agregasi pengalaman bersama dari satu pengalaman masyarakat dalam hal reaksi mereka kepada situasi, baik suatu kebudayaan, politik, maupun ekonomi pada masa satu ke masa lain. Ini merupakan salah satu kesadaran yang secara kumulatif ada di dalam ingatan masyarakat secara kolektif.

Kesadaran semacam itu terdapat dalam tiap masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Pertumbuhan nasion Indonesia, misalnya merupakan produk dari kompilasi pengalaman yang dialami masyarakat kita dari masa

lampau yang kemudian menciptakan satu situasi kebersamaan yang menimbulkan rasa bersama dengan menentukan satu pengalaman identitas. Sebenarnya belum lahir nasion Indonesia, masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia telah memiliki satu kesadaran sejarah yang sesuai dengan alam pikiran filsafah yang mendasari, seperti yang tercermin dalam bentuk penggambaran mitos dan legenda.

Legenda atau mitos itu sesungguhnya merupakan salah satu bentuk pencerminan penjernihan sejarah yang dilandasi oleh suatu konsepsi filosofi dari masyarakat tradisional dalam usaha mereka menjawab tantangan atau persoalan yang ada di sekelilingnya, yaitu tantangan yang bersifat fisik atau yang bersifat sosial. Kita mengenal bermacam-macam gejala alam, baik yang bersifat material maupun yang berupa bentuk-bentuk yang ada. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila mitos dan legenda merupakan suatu bagian budaya tradisional yang tersebar yang terdapat di kepulauan kita dengan bermacam ragamnya. Tidak jarang persoalan yang bersifat sosial itu banyak sekali, juga dijawab dengan berbagai macam konsepsi pandangan yang bersifat mitos dan legendaris. Kalau kita kumpulkan berbagai macam bentuk mitos dan legenda, lalu kita tempatkan dalam kerangka historis ini, dapat ditarik makna pentingnya, dalam arti untuk menekankan adanya *satu*, katakanlah konsepsi nasional. Tetapi banyak juga masalah yang berhubungan dengan hubungan sosial, misalnya untuk menyusurgalurkan tokoh sejarah penting yang perlu dihubungkan asal mulanya, seperti dengan Syeh Maulana Ibrahim atau di Jawa Timur sebagai pengajar Islam yang diceritakan lahir yang tidak diketahui asalnya tetapi didapat dari seorang pengail yang menemukan bayi itu dari buangan di sungai, yang menggambarkan satu tema dengan anak yang rupanya ditemukan di tempat lain. Di dalam cerita agama tema demikian kita kenal dalam kisah Musa dan sebagainya. Kalau kita letakkan dalam prepektif historis tema itu, akan mempunyai arti penting, dan dalam rangka pengajaran dan pendidikan mungkin bisa diambil makna yang bisa dipakai sesuai yang kita tuju.

Kalau dilihat perkembangannya, munculnya kesadaran sejarah untuk mengumpulkan pengalaman-pengalaman lama, tidak lagi melalui cerita, atau mitos yang disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi berikutnya. Sesungguhnya penyampaian itu juga dilandasi satu konsepsi sejarah yang bersifat filosofi, dalam hubungannya dengan konsepsi raja dengan masyarakat yang secara yuridis bisa diamati bahwa ada satu konsep dasar yang dipakai dalam penyampaian itu. Satu konsep tentu sesuai atau mencerminkan masyarakat pada masa abad atau hikayat itu ditulis.

Kalau kita lihat lagi perkembangannya, setelah kita mengenal penjajahan, untuk penulisan sejarah timbul yang baru lagi sesuai dengan masa dan situasinya yang kita kenal dengan tulisan-tulisan dari orang-orang Belanda mengenai masyarakat dan masa zaman penjajahan itu. Kita diwarisi konsepsi sejarah yang berbeda dari konsepsi tradisional dari masyarakat pribumi kita, yaitu konsepsi yang lebih menekankan kepada masalah perkembangan sejarah secara Barat dan kebetulan dengan konsepsi ini setelah kemerdekaan kita bisa meneliti kembali bahwa apa yang ditulis itu sesungguhnya lebih menekankan atau lebih ditujukan kepada atau dipengaruhi oleh konsepsi kebudayaan yang berlaku pada waktu itu. Konsepsi kebudayaan kolonial dan konsepsi kebudayaan Eropa yang bersifat superior memandang bahwa masyarakat putih sebagai golongan superior yang berdiri di atas orang-orang terjajah yang inferior. Tulisan yang dihasilkan berada dalam kerangka pikiran semacam itu; golongan masyarakat terjajah tidak mempunyai arti, selalu tergantung kepada golongan orang putih yang lebih berorientasi kepada pemikiran yang bersifat eropasentris dan nederlandsentris. Konsepsi-konsepsi inilah yang kemudian dibedakan dengan konsepsi-konsepsi tradisional. Dalam pertumbuhan berikutnya kita mengenal sejarah revolusi. Setelah negara dan nasion Indonesia berdiri, timbul satu persoalan untuk merevisi atau meninjau kembali penulisan sejarah atau warisan sejarah dari masa lampau dari masa tradisional dan kolonial yang dianggap sudah tidak sesuai lagi.

Dengan kata lain, setiap jaman itu membutuhkan satu penjernihan sejarah. Setelah kita merdeka sudah ada usaha penjernihan mengenai penulisan sejarah kolonial dan sejarah tradisional yang ingin digunakan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepentingan masyarakat Indonesia yang merdeka. Kita mengenal usaha untuk meletakkan dasar-dasar bagaimana menyusun kembali, merekonstruksi sejarah Indonesia yang sesuai dengan tuntutan jaman, dan juga disepakati perlunya mengubah konsepsi sejarah dengan konsepsi nasional yang bersifat nasional indonesiasentris.

Dari berbagai segi itu ada beberapa persoalan, antara lain persoalan untuk merevisi atau menjernihkan kembali persoalan tafsiran sejarah. Pada masa sebelum perang sudah banyak teksbook, dan sampai lama belum sempat atau belum sampai dihasilkan lagi sehingga sesudah perang kita kenal banyak teksbook. Buku yang dihasilkan hanya berupa terjemahan dari yang lama.

Hal itu dianggap tidak cocok karena tidak sesuai dengan historisitas masyarakat Indonesia baru. Banyak seminar dan pembicaraan diusahakan untuk melahirkan satu teksbook yang cocok. Usaha telah ada tetapi ternyata belum mampu secara baik menyajikan teksbook yang sempurna.

Namun demikian ada perkembangan. Dengan catatan ini saya ingin melihat bagaimana persoalan-persoalan yang timbul, yang tidak hanya dihadapi oleh para pelajar atau penutur sejarah di bidang pendidikan dan pengajaran. Konsep-konsep ini relevan untuk kita pegang agar dapat sampai pada sasaran yang ingin dituju, yaitu menghubungkan usaha untuk mempersoalkan kembali atau memahami persoalan-persoalan sejarah atau kesadaran sejarah yang ingin kita pelajari itu.

Ada tiga hal, yang akan dibicarakan, yaitu:

1. Masalah yang bersifat konseptual mengenai falsafah sejarah atau fisis sejarah;

2. Masalah yang berhubungan dengan kerangka konseptual yang memberikan landasan bagi seleksi dan interpretasi kejadian sejarah;
3. Kerangka konseptual yang kita sepakati sebagai sejarah nasional yang perlu dipegang sebagai kerangka, penggarapan, penglihatan, maupun pengajaran.

Sebelum itu ada butir-butir mengenai bagaimana sejarawan atau peneliti sejarah, mungkin juga pengajar, perlu kita sepakati dalam melihat persoalan-persoalan sejarah, yang dalam konsep sejarah dilihat sebagai satu koneksitas masa lampau, masa kini, dan masa depan.

Hal lain yang menarik ialah bahwa sesungguhnya fakta yang sesungguhnya produk dari masa lampau itu, pada dasarnya juga tergantung dari masa kini.

Artinya sejarawan tidak menghadapi realitas itu sendiri, sejarawan hanya menghadapi bekas dalam fakta berupa pernyataan, simbul dari realitas. Sejarawan dituntut untuk menjelaskan, dan di dalam penjelasan ini ia dipengaruhi oleh kebudayaan masa kini, sehingga dengan demikian sesungguhnya masalah-masalah masa lampau tidak semuanya bisa kita tangkap atau ditangkap oleh sejarawan karena pada hakikatnya sejarawan pun melihat masa lampau itu melalui kacamata kebudayaannya. Itu berarti terjadi seleksi yang dihubungkan dengan makna atau hubungan dengan nilai atau hubungan dengan nilai atau yang penting, sehingga penting untuk pengertian sekarang. Di sinilah sesungguhnya mulai timbul apa yang kita kenal seleksi.

Oleh sebab itu usaha menafsirkan masa lampau sejarawan tidak bisa lepas dari persoalan masa sekarang. Wajarlah karenanya dalam tujuan pragmatis teoretis, sesungguhnya panggilan sejarawan atau kesadaran sejarah ini tidak lepas dari seleksi hanya untuk kepentingan sekarang. Kalau sekarang pemerintah menghadapi masalah pembangunan, di sini ingin ditekankan bagaimana kesadaran sejarah atau sejarah bisa membantu dalam melancarkan pembangunan, terutama dalam pembangunan men-

tal, membentuk manusia seutuhnya, berlandaskan Pancasila dan sebagainya.

Di sini sejarah ingin dicari nilai-nilainya. Para pengajar atau peneliti yang ingin mencari nilai pengalaman masa lampau ini harus menyeleksi dalam hubungan kepentingan ini. Jadi sesungguhnya tidak mengherankan kalau ada perbedaan tekanan karena sejarawan atau pengajar sejarah sesungguhnya juga dilandasi oleh satu tujuan atau tujuan mana yang membuat keduanya itu harus melakukan seleksi. Seleksi inilah sesungguhnya yang membuat sejarah pada masa lampau, dan pada dasarnya tidak seluruhnya diterangkan atau dicakup. Sejarawan harus menyeleksi mana yang penting, dan tentu dalam hal ini menyangkut dalam hubungan konsepsi budaya, antara lain maknanya sendiri, apa arti peristiwa itu, kepentingan yang ingin dipahami atau yang ingin dipakai dalam tujuan pragmatis itu.

Demikian juga sesungguhnya di dalam memahami persoalan peristiwa sejarah yang ingin digali atau dicari dalam masalah ini, sesungguhnya para sejarawan atau pengajar tidak lepas dari kerangka pikiran yang selektif agar bisa melakukan interpretasi, di sini ada proses yang sama-sama dihadapi antara seorang observator sejarah dan juga seorang pengajar.

Seorang sejarawan atau seorang peneliti sejarah melihat fakta dalam obyeknya, yaitu manusia sebagai aktor, apakah individual (kalau berbicara soal biografi), apakah itu komunitas sosial (kalau kita bicarakan masalah sosial) kita lihat apa oknum itu berdialog dengan situasi dan lingkungannya, tempat mereka ditentukan atau dipengaruhi oleh masalah situasinya, apakah ekologiannya, apa sosial ekonominya, dan sebagainya. Di mana pun manusia memiliki tingkah laku yang dipengaruhi oleh faktor yang ada di sekelilingnya, melakukan reaksi, dan reaksi itulah yang kemudian dilihat oleh para peneliti sejarah atau penulis sejarah sebagai produk tingkah-laku aktor ini.

Tingkah-laku itu dipengaruhi oleh *Tindakan*, apakah itu pemberontakan, apakah itu satu penemuan, apakah itu satu hal yang bersifat historis yang berupa situasi yang bisa diamati. Di sini pun pengamatan seorang peneliti mirip dengan pengamatan pengajar; namun perlu ada perbedaan penekanan, yaitu antara penekanan untuk tujuan praktis pedagogis dan penekanan yang bersifat akademis.

Bagaimana kalau kita mau mengambil nilai tertentu dari peristiwa sejarah, masalah-masalah sejarah yang dapat kita pakai sebagai usaha untuk menjelaskan atau dipakai sebagai tujuan-tujuan pragmatis itu dengan konsepsi mana atau kerangka pikiran yang manakah seharusnya kita miliki agar sampai pada sasarannya. Mengapa diperlukan kerangka konseptual, kerangka pikiran yang perlu kita miliki atau kita sepakati bersama dalam melihat persoalan sejarah Indonesia?.

Menurut saya ada alasannya, yaitu kalau kita melihat bahwa persoalan masyarakat Indonesia dan persoalan sejarahnya. Sebagai masyarakat yang majemuk pruralitis dan heterogen, persoalan sejarahnya juga bersifat kompleks dan heterogen sehingga dalam usaha memahami persoalan yang kompleks yang heterogen itu perlu disepakati atau perlu dimiliki satu konsep yang bisa dipakai untuk bisa memahami dan menangkap persoalan yang penting yang mempunyai nilai dan makna bagi tujuan nasional atau tujuan-tujuan yang ingin kita tuju itu. Kemajemukan itu, bisa kita lihat misalnya dalam heterogenitas masyarakatnya dan heterogenitas masalah kontek hubungan interaksi, yaitu kalau kita melihat setelah terbentuknya nasion atau negara. Nasion ini memperlihatkan hubungan antara negara yang bersifat nasion, yang secara administratif bersifat sentral, pusat, dan sifat-sifat yang bersifat lokal. Jadi ada yang bersifat satu segi, yaitu satu skala nasional yang memiliki perbedaan tertentu dalam rangka tertentu, sehingga untuk tujuan tertentu kita memerlukan kerangka pikiran yang bisa mengabstraksikan sifat heterogenitas dan kompleksitas itu. Banyak

sekali peristiwa sejarah lokal yang kontroversial antara satu sama lain kalau dilihat dalam konteks tertentu. Bagaimana hal itu harus diinterpretasikan dan dipakai sebagai alat pendidikan.

Untuk mengatasi hal ini diperlukan satu konsensi bersama, satu kerangka konseptual yang bisa memberikan landasan bagi seleksi dan interpretasi yang bisa memanfaatkan nilai-nilai yang terkandung dari peristiwa-peristiwa itu, baik dalam usaha melihat satu kerangka obyektivitas dari proses sejarah maupun dalam tujuan-tujuan sejarah, yang pertama saya kira sudah kita sepakati bersama, yaitu perlunya kerangka teoritis dalam interpretasi yang perlu dikaitkan dengan satu visi historis yang indonesiasentris. Dengan demikian, dalam menginterpretasi sejarah dimungkinkan terdapat tafsiran yang berbeda, misalnya interpretasi Werthem dalam peristiwa G-30-S berbeda dari yang lain karena dilandasi oleh kerangka konsepsi atau visi sejarah yang berbeda.

Di samping itu dalam menggarap atau melihat masalah sejarah Indonesia, agar tidak ada kontraversi pada tingkat tertentu dalam tujuan tertentu, perlu kita sepakati kerangka tersebut, misalnya dalam kaitan dengan pembentukan dan pembinaan bangsa dan negara nasional kita yang masih dalam proses integrasi.

Ada beberapa segi proses integrasi, yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Kita melihat integrasi nasional sebagai lanjutan dari integrasi teritorial. Dalam hubungan itu masih kita dengar keluhan yang berhubungan dengan kepemimpinan antara *patron* dan *client*, antara pemerintah dan yang dipimpin, antara pusat dan daerah, pemuka dengan yang dipimpin karena sering terdapat kesenjangan. Jadi mungkin bisa dikatakan masih ada proses yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan, yaitu proses integrasi, sebagai proses yang besar ingin dituju dalam pembangunan. Proses sikap integratif inilah tujuan pragmatis dan pedegogis yang penting untuk ditanamkan dan kemudian dija-

dikan tema, tidak hanya dalam pendidikan sekolah tapi juga dalam masyarakat, sampai-sampai soal masalah partisipasi dan sebagainya. Yang akhir ini tidak lain adalah masalah sikap integrasi yang perlu disempurnakan dan ditingkatkan; dalam hal ini, nilai-nilai sejarah bisa digunakan.

2. Kerangka konseptual yang perlu kita sepakati dalam melihat persoalan sejarah lokal dan sejarah nasional. Konsep sejarah nasional ini tidak hanya perlu kita sepakati sebagai suatu pemikiran teoretis, tapi juga secara historis mungkin bisa dipertanggungjawabkan. Secara teoretis perlu kita lihat bahwa masyarakat yang bersifat fragmentaris yang regional satu sama lain, katakanlah berdiri sendiri, merupakan unit sendiri, baik sebagai budaya, suku, maupun politik. Pada masyarakat Indonesia Modern unit-unit itu lebur, bersatu dalam satu kerangka unit nasional yang besar. Dengan demikian sejarah nasional perlu kita tempatkan dalam kerangka sebagai makro-unit, sebagai unit yang besar mencakup unit-unit yang banyak di dalam daerah kawasan Nusantara yang masing-masing memiliki sistem sendiri. Satu sistem yang berlaku secara nasional yang menghubungkan makro-unit dengan unit-unit yang di dalamnya, dengan komplikasi, dan interdependensinya. Interdependensi itu bukan satu penjumlahan secara lokal, proses pembentukan bersama dalam mana peristiwa sejarah lokal merupakan salah satu bagian proses yang membentuk nasion, tetapi interdependensi dalam melihat sehingga sejarah nasional itulah didukung oleh peristiwa-peristiwa lokal yang memberikan gambaran tentang proses yang datang dari atas yang kemudian tercermin di bagian bawah; bagian bawah itu, bagian lokal unit-unit nasional, harus dilihat dalam kacamata nasional, dalam kacamata integratif. Selebihnya sejarah lokal harus kita lihat sebagai bagian sejarah nasional atau merupakan akibat produk dari pengaruh-mempengaruhi unit kecil dengan unit besar. Dengan dasar itu kita akan bisa menyeleksi makna peristiwa itu. Dalam seleksi kita hindarkan hal yang berbeda, kita bisa menekan dekrepensi dan kita bisa menarik nilai apa yang ingin kita tekankan bersama.

Contoh: persoalan apakah Aru Palaka itu pahlawan atau bukan, Hasanuddin itu pahlawan atau bukan. Dalam konteks nasional akan bisa diangkat mana yang penting, apakah masalah kepahlawanan ataukah masalah integritasnya, ini bisa didudukan persoalannya.

Masalah yang bersifat sentral nasional yang lokal perlu didekati sesuai dengan skala unit sejarah yang kita hadapi. Kalau masalahnya mencakup masalah luas yang bersifat nasional, pendekatan analisa makro ini lebih dipentingkan daripada analisa mikro. Demikian juga kalau kita menghadapi sejarah lokal perlu dipergunakan pertanyaan-pertanyaan mikro, bukan pertanyaan makro. Dengan dasar demikian, pegangan ini bisa dipakai untuk melihat skala sejarah Indonesia yang melibatkan tokoh dan peristiwa. Tokoh itu harus dikaitkan dan dinilai dalam kerangka pikiran yang tepat. Dengan jalan demikian selain perspektif historis yang luas kita bisa memperoleh juga perspektif nasional dalam peristiwa sejarah. Harus kita pandang pula bahwa tiap sejarah lokal pada dasarnya suatu interaksi antara subunit yang ada di situ, yaitu interaksi antara masyarakat lokal dengan lingkungannya, dengan struktur sosial dan sebagainya, mempunyai warna sendiri yang pada dasarnya dipengaruhi oleh arus yang terdapat atau yang berlangsung dalam skala nasional. Kita mengenal arus utama sejarah kita secara kontinyu, berlangsung dari arus kebudayaan Hindu, Islam, Barat, sampai yang sekarang yang supramodern. Lapisan-lapisan pengaruh itu juga mempengaruhi proses yang terjadi di lingkungan bawah, yaitu lingkungan lokal sehingga dengan demikian kita bisa memahami perbedaan-perbedaan suatu daerah dengan daerah lain dalam menanggapi atau mereaksi terhadap situasi yang bersifat makro. Dengan ini kita bisa menginterpretasikan mengapa Perang Diponegoro, dan Perang Padri dianggap perang kolonial, karena kalau diangkat dalam skala nasional, yaitu melihat masih adanya arus utama yang baru, masuknya kolonialisme dan nasionalisme menimbulkan reaksi dari daerah. Reaksi-reaksi itu tumbuh sesuai dengan lingkungannya yang

makin merupakan tanggapan pada jamannya, pada situasinya sesuai dengan apa yang kita katakan kesadaran sejarah itu. Itu respon terhadap situasi budaya dan politik. Akhirnya saya ingin memberi catatan rekomendasi, usul atau saran, yaitu dalam rangka meneliti, kemudian menyeleksi untuk pengajaran.

Pertama, dalam penelitian/penulisan pengajaran diperlukan suatu konsep yang kita pegang bersama, yaitu seleksi tentang nilai yang minim; nilai-nilai itu harus berhubungan dengan persoalan-persoalan yang bersifat integratif.

Kedua, dalam penelitian, penulisan, atau pengajaran bisa diarahkan atau dipilih hal-hal yang bersifat biografis atau ke tokohhan. Apakah itu ditekankan kepada segi kepahlawanan atau yang menimbulkan segi-segi emosional.

Ketiga, pembinaan kesadaran sejarah saya kira tidak hanya pada segi-segi bersifat biografis dan sosial tetapi bisa ditekankan segi lain yang berhubungan dengan pembinaan sejarah, sejarah kebudayaan, sejarah kesenian, sejarah pemikiran, dan sejarah sosial. Tentu saja ini membutuhkan cara penggarapan dan penulisan atau pengajaran yang mantap, perlu pemikiran yang tuntas dalam arti cara atau metodenya. Namun ingin saya tekankan agar masyarakat/anak didik tersentuh oleh historisitas itu tidak hanya yang bersifat berhubungan dengan ketokohan, tetapi yang bersifat sosial, religius, dan lain-lain yang diangkat dari peristiwa historis. Tentu saja di dalam hal ini penekanan dalam pemilihan topik ini penulisan sejarah bisa diarahkan atau bisa dicari yang cocok dengan ini.

Keempat, pembinaan kesadaran sejarah/kesejarahan, pembinaan rasa sejarah ini tidak hanya ditopang oleh tersedianya buku teks/buku, tetapi juga penilaiannya yaitu pengajaran masalah, penjernihan, nama dan sebagainya.

PEMBINAAN DAN KESADARAN SEJARAH

Ayatrohaedi

Dalam masalah sejarah ada empat kejernihan yang diperlukan untuk memperoleh hasil yang jernih.

Kejernihan yang pertama yaitu yang berhubungan dengan *wawasan*. Wawasan mengenai apa itu sejarah dan sebagainya, untuk misalnya dalam pidato pengukuhannya Dr. Nugroho Notosusanto mengatakan sejarah untuk masa kini.

Syarat yang kedua, harus mempunyai *gagasan* yang jernih untuk mengisi wawasannya itu.

Yang ketiga, yaitu kejernihan *landasan* teori, metodologi dan sebagainya, yang biasanya dilakukan para ahli sejarah.

Yang keempat, semua itu harus didukung oleh kejernihan *kupasan*. Kupasan ini mungkin dalam tulisan, mungkin juga secara lisan dalam penyuluhan-penyuluhan. Pengupas harus menguasai penguasaan bahasa dengan baik dan benar sejalan dengan kaidahnya dan ini sangat perlu.

Empat hal inilah yang saya kira pada dasarnya diperlukan, yaitu kejernihan wawasan, gagasan, landasan, dan kupasan. Dengan ini mungkin akan dihasilkan satu kisah sejarah yang jernih. Kalau ternyata tidak jernih, baru diadakan penjernihan

di dalam kaitannya dengan kenyataan-kenyataan, misalnya dalam gagasan-gagasan sekarang. Dalam sejarah ini kita lihat juga adanya ketidakjernihan dalam pendekatan. Jurusan Sejarah yang ada di Indonesia, misalnya, hanya membicarakan masalah sesudah 1500 sampai sekarang, sedangkan sebelum 1500 masuk arkeologi.

Padahal nyatanya, betapapun tuanya, kalau namanya sejarah, sejarah kuna itu seharusnya ada di jurusan sejarah. Dengan demikian studi di jurusan sejarah mencakup masa yang jauh lebih lama, dan jurusan arkeologi harus rela melepaskan bagian-bagian yang pada dasarnya bukan bagian jurusan arkeologi. Data sejarah kuna memang data prasasti, katakanlah yang hanya dikuasai oleh ahli arkeologi, tetapi kalau untuk dituliskan menjadi tulisan sejarah, mahasiswa memerlukan metode sejarah dan itu tidak diberikan di jurusan arkeologi. Karena itu mahasiswa arkeologi yang menulis tentang sejarah masa kuna, kelihatan sekali bobot metodiknya hampir tidak ada. Kemudian juga kenyataan, di dalam masalah landasan atau gagasan ini ada yang juga kurang jernih, karena tidak jarang di antara kita, ingin menerapkan pandangan hidup zaman sekarang untuk masa lampau. Ketika saya mengatakan, sebagai contoh, Sanjaya itu adalah anak Sanaha dari Sanna, langsung para ahli arkeologi protes, Sanna dan Sanaha ini menurut salah satu bukti ternyata bersaudara, walaupun saudara tiri. Mereka beranggapan bahwa itu inses, seolah-olah peristiwa yang terjadi 1300 tahun yang lalu itu tidak boleh terjadi menurut kacamata ideal sekarang. Padahal dalam koran-koran pun seperti *Pos Kota*, inses selalu terjadi. Apalagi 1300 tahun yang lalu ketika jumlah manusianya dapat dihitung. Kalau tidak ada inses, tidak ada kita semua ini, karena turunan Nabi Adam sampai tahap tertentu selalu inses.

Lalu juga kita lihat kembali penerapan pola yang sekarang untuk keperluan sesuatu. Misalnya saja ketika zaman perjuangan Yamin mencanangkan ada dua negara kesatuan,

yang pertama Sriwijaya, kedua Majapahit. Saya kira hal itu sebenarnya untuk perjuangan politik ketika kita terpecah-pecah. Memang itu diperlukan. Tetapi setelah kita sekarang sebagai satu negara dan kalau kita sudah dewasa kita tentunya harus berpikir apakah betul negara kesatuan. Kalau itu setidak-tidaknya meliputi wilayah Republik Indonesia yang sekarang, harus kita lihat data sejarah; Sriwijaya tidak pernah menguasai seluruh wilayah Indonesia. Ketika Sriwijaya pada masa jayanya pada abad 9 – 10, di Jawa Timur ada Kediri, Singasari, jadi tidak pernah ada negara kesatuan Sriwijaya. Barangkali dalam hal ini Yamin mengacaukan pengertian politik itu dengan kenyataan bahwa pada masa lampau bahasa Indonesia dipergunakan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi jsutru bahasa Indonesialah yang menjadi bahasa persatuan, tetapi bukan Sriwijaya. Apalagi Majapahit. Itulah sebabnya di Bandung tidak ada Jalan Gajah Mada, karena buat orang Sunda Majapahit bukan negara kesatuan, tetapi negara kolonial. Buat orang Jawa memang barangkali negara kesatuan yang paling besar sampai sekarang.

SUATU CATATAN TENTANG KESADARAN SEJARAH

Sutrisno Kutoyo

1. Apakah Kesadaran Sejarah ?

Sudah banyak teori yang dikemukakan tentang kesadaran sejarah, di antaranya seperti yang terdapat dalam naskah *Hasil Rapat Penyusunan Kerangka Masalah Pembinaan Kesadaran dan Penjernihan Sejarah*, Proyek Pembinaan Kesadaran dan Penjernihan Sejarah, tahun 1984/1985 tanggal 3 sampai dengan 7 Mei 1984.

Sekedar untuk mengingatkan kembali, di sini dicuplik beberapa hal:

- a. *Dr Kuntowijoyo* : Kesadaran sejarah merupakan usaha pemahaman bahwa seseorang itu termasuk bagian dari masa lampau, dibentuk oleh masa lampau dan masa lampau itu mengutuh dalam masa sekarang.
- b. *Dr Taufik Abdullah* : Kesadaran sejarah adalah kesadaran bahwa masa lampau (*the past*) adalah sejarah, maksudnya bukan mitologis sehingga masyarakat dapat mengambil kearifan dari sejarah (*the wisdom of history*). Kesadaran sejarah berdasarkan kebenaran dan bukan bertolak dari mitologi.

- c. *Dr Djoko Suryo* : Kesadaran sejarah bersifat kolektif, merupakan satu bentuk agregasi dari berbagai pengalaman bersama dari satu komunitas, terhadap reaksi mereka pada situasi baik kebudayaan, politik, maupun ekonomi dan sebagainya, pada suatu masa ke masa yang lain.
- d. *Drs R.Z. Leirissa* : Kesadaran sejarah adalah satu pemahaman tentang hakikat studi sejarah (*historical studies*), yaitu kesadaran bahwa sejarah merupakan dialog dalam tiga dimensi.
 Pertama, studi sejarah adalah suat dialog antara sejarawan dan sumber sejarahnya; kedua, studi sejarah adalah dialog antara satu sejarawan dengan sejarawan (para sejarawan) lainnya; ketiga, studi sejarah adalah dialog antara sejarawan dan masyarakatnya.
 Kesadaran sejarah dapat dicapai dengan memasyarakatkan studi sejarah kepada masyarakat.
- e. *Dr T. Ibrahim Alfian* : Kesadaran sejarah tidak lepas dari konteks sosial dan budaya masyarakat.
- f. *Dr Ayatrohaedi* : Kesadaran sejarah meliputi berbagai aspek, di antaranya wawasan mengenai sejarah itu sendiri, gagasan yang terkandung di dalam wawasan sejarah, landasan teoritis dan metodologis dari penelitian sejarah, dan kupasan tertulis dan lisan tentang sejarah.
- g. *Drs A.B. Lopian* : Kesadaran sejarah tidak lepas dari penjernihan sejarah, yaitu penelitian. Penelitian meliputi hal-hal yang elementer seperti *who, what, when, why*; citra sejarah yang melekat pada suatu peristiwa atau kasus (misalnya: Sriwijaya negara maritim, Majapahit negara agraris); fungsi pendidikannya seperti perlunya kepastian dalam fakta dan citra, serta hal-hal yang kontroversial.
- h. *Letkol Drs Saleh A. Djamhari* : Kesadaran sejarah dalam masyarakat sudah cukup tinggi. Pembinaannya diperlukan dengan penambahan informasi dan tenaga sejarawan.

- i. *Dr Muchlis* : Kesadaran sejarah sudah ada dalam masyarakat sejak dahulu, walaupun pada mulanya tidak dapat dihindarkan masih bertumpu pada hal-hal yang kabur dan samar-samar, yang diliputi kabut mitologi seperti halnya kasus *To manurung* dalam sejarah Sulawesi Selatan.
- j. *Dr Andre Hardjana* : Kesadaran sejarah merupakan proses yang tidak statis. Perubahan dapat terjadi apabila berkurangnya kesahihan teori lama, lahirnya teori dan ideologi baru, timbulnya peristiwa dan yang dianggap lebih penting dan harus dipecahkan, dan sebagainya. Selain itu perlu juga disebutkan beberapa sejarawan/tokoh yang mempunyai pendapat tentang kesadaran sejarah.
- k. *Dr Ruslan Abdulgani* : Kesadaran sejarah itu suatu sikap kejiwaan atau *mental attitude* dan *state of mind* yang merupakan kekuatan. Untuk ikut aktif dalam proses dinamikanya sejarah. Kesadaran sejarah mencakup *pertama*, pengetahuan tentang fakta sejarah serta hubungan kausalnya (sebab musabab antara fakta-fakta itu); *kedua*, pengisian alam pikiran kita dengan logika, yaitu adanya hukum tertentu dalam sejarah; *ketiga*, peningkatan hati nurani kita dengan hikmah kearifan dan kebijaksanaan, untuk menghadapi dan bercermin kepada pengalaman-pengalaman masa lampau (*arsip dan sejarah*, h.4).
- l. *Dr Soedjatmoko* : Kesadaran sejarah merupakan suatu sikap jiwa dan cara untuk menghadapkan diri dengan kenyataan, dengan realitas sosial, dalam perspektif hari ini, di dalam perspektif hari lampau, tetapi juga dalam perspektif hari depan (*arsip sejarah*, h.14).

Kesadaran sejarah juga mewujudkan kepribadian nasional. Kesadaran sejarah merupakan suatu orientasi intelektual, suatu sikap jiwa yang perlu untuk memahami secara tepat faham kepribadian nasional. Kesadaran sejarah itu membimbing manusia kepada pengertian mengenai

diri sendiri sebagai bangsa, kepada *self understanding of a nation*, kepada persoalan *what we are, why we are*.

Kesadaran sejarah akan memberikan kemantapan dan kreativitas dalam membangun.

Kesadaran sejarah itu untuk *self understanding*, tetapi kesadaran sejarah juga harus ditujukan kepada sejarah itu sendiri, yaitu sejarah sebagai proses, bukan sebagai rangkaian faktor.

Sejarah sebagai proses interaksi terus-menerus antara realitas sosial dan manusia pada setiap garis dalam garis waktu (Arsip dan sejarah, h. 19-20).

- m. *Prof. Dr Sartono Kartodirdjo* : Kesadaran sejarah ada pada semua orang seperti terwujud pada tindakan berziarah ke kubur nenekmoyang, melacak silsilah keluarga, mencari jejak pencurian dan sebagainya. Kesadaran sejarah menimbulkan kesadaran bahwa masa depan adalah bagian dari waktu, bagian dari dunia kita, maka ada proses-proses sejarah yang sama akan terjadi.

Kesadaran sejarah mempunyai pengaruh higienis terhadap jiwa kita karena membebaskannya dari sifat serba percaya belaka. Kesadaran sejarah makin meningkat dengan memiliki pengetahuan sejarah. *Historical mindedness*, suatu kemampuan untuk dapat membayangkan bagaimana suasana sejarah di masa lampau, bagaimana iklim kebudayaannya, sentimen-sentimen, ide-ide yang hidup, sistem kepercayaannya, gaya hidup, mentalitas dan sebagainya (Arsip dan sejarah, h. 27-36).

- n. *Drs Abdurachman Suryomihardjo* : Karya sejarah hendaknya berupa suatu penyusunan dengan sebaik mungkin tentang pasang surut kegiatan bangsa, maju-mundurnya karya budayanya, timbul-tenggelam pranata-pranatanya, unggul-kalahnya dalam perjuangan, dalam suatu irama sejarah Indonesia yang dapat menggambarkan suka-duka, kegemilangan dan kesuraman, kepahlawanan, kewibawa-

an, serta kekerdilan jiwa para tokohnya. (*arsip dan sejarah* h. 52).

- o. *Dr Yan Romein* : Kesadaran akan perlunya sejarah itu bukan semata-mata timbul karena masa lampau itu sendiri, keingintahuan mengenai masa lampau, tetapi juga karena hal-hal yang bersifat praktis dan bernilai material.

Yang menjadi persoalan, apa yang harus dan perlu diingat dari masa lampau itu, dan *mengapa* harus diingat.

Rupanya yang diperlukan dari sejarah itu ialah:

- 1) keperluan untuk membentuk tradisi (adat istiadat);
- 2) untuk membentuk kewibawaan atau kekuatan magis dari raja;
- 3) penghormatan bagi orang-orang besar/orang yang dihormati yang telah meninggal dunia (biografi);
- 4) penyusunan daftar silsilah;
- 5) penyusunan daftar peristiwa, masa pemerintahan raja, kepala gereja, konsul, dan lain-lain; dan
- 6) penyusunan surat bukti kekuasaan, pemilikan gelar, dan sebagainya (*In de Hof der Historie*, H. 68-69).

2. Kesadaran Sejarah dan hubungannya dengan Masyarakat.

Kesadaran sejarah itu bukan hal yang statis, tetapi mengenal perubahan dan perbedaan. Manusia sebagai perorangan memiliki kesadaran sejarah, seperti seorang ibu rumahtangga yang membayar hutang belanjanya di warung biasanya mengamati catatan bon-bonnya terlebih dahulu.

Masyarakat sukubangsa sebagai komunitas sejak dahulu juga memiliki kesadaran sejarah, seperti adanya upacara adat dan pranata. Kesadaran sejarah yang masih bertumpu pada mitologi itu penting juga fungsinya, misalnya ramalan Jayabaya yang terbukti menjadi pendorong perjuangan kemerdekaan.

Bahkan Sultan Hamengku Buwono IX yang berpendidikan Barat juga tetap menghargai ramalan Jayabaya.

Beliau berkata, "... Kenyataannya ramalan Prabu Jayabaya benar-benar terlaksana, asalkan kita tahu bagaimana mengartikan kata-kata penuh kiasan itu, ...

Namun sekali lagi, tiap ramalan hendaknya dihadapi sewajarnya saja, sekedar diterima sebagai pengetahuan dan jangan terlalu dijadikan pedoman. (*Tahta untuk Rakyat*, h. 113).

Demikian juga di kepulauan Banda terdapat suatu ramalan seperti ramalan Jayabaya. Ketika Laksamana Jacob van Heemskerke mendarat di Pulau Lonthor pada tanggal 16 Maret 1599, masyarakat di sana segera teringat pada ramalan yang pernah diucapkan lima tahun sebelumnya oleh seorang suci beragama Islam, bahwa sekelompok orang kulit putih dengan senjata yang lebih kuat akan datang dan menguasai kepulauan Banda. Karena itu penduduk kepulauan Banda menaruh curiga dan bersikap memusuhi orang-orang Belanda. (Kepulauan Banda, h. 9 dan 25).

Kesadaran sejarah dapat dimanfaatkan untuk usaha pembangunan. Bupati Gunung Kidul, Darmakum Darmokusumo, seorang sarjana kehutanan, dalam membangkitkan semangat penduduk Gunung Kidul untuk membangun desanya, memulai dengan motivasi agar penduduk mencintai dan bangga akan desanya.

Bupati Darmakum memakai metode kesadaran sejarah. Ia berkata, "Ini memang bukan bohong-bohongan. Sebuah legenda telah mengisahkan, seorang putera raja terakhir Majapahit yang meninggalkan keraton berkelana ke Gunung Kidul. Kalau begitu 'kan masyarakat di sini masih keturunan para bangsawan'".

Dengan modal kesadaran sejarah itu masyarakat mau diajak membangun dan hasilnya selama Pelita III produktivitas padi di Gunung Kidul tercatat 54,72%, sementara rata-rata di Yogyakarta hanya 9,56%, produksi jagung naik 21,75%, ubikayu 11,72%, dan sebagainya. (*Kompas*, 25 Agst '84).

Para pemimpin bangsa pada zaman Pergerakan Nasional juga menggunakan metode kesadaran sejarah untuk membangkitkan semangat dan keyakinan kemerdekaan. Misalnya, Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI Baru pada tahun 1932 mewajibkan anggota barunya untuk diuji dahulu dengan bahan sejarah, yaitu Sejarah Umum Indonesia, terutama sejarah pergerakan sejak timbulnya Budi Utomo dengan mengetahui perbedaan antara politik kooperasi dan non-kooperasi, serta "Imperialisme dan pertumbuhannya, kapitalisme dalam perkembangannya, kolonialisme dan kedaulatan rakyat" (*arsip dan sejarah*, h. 41).

Kesadaran sejarah yang hidup di kalangan PNI Baru tahun 1932 itu sudah tentu tidak lagi bersangkut paut dengan mitologi.

Tetapi di dalam masyarakat kita, setidaknya-tidaknya beberapa dasawarsa yang lalu, pengertian kesadaran sejarah itu belum sepenuhnya sesuai dengan misalnya visi Dr. Taufik Abdullah, yaitu bahwa kesadaran sejarah itu adalah kesadaran masa lampau yang bersejarah.

Masyarakat Asmat di Irian mempunyai kesadaran sejarah, bahwa mereka berasal dari *Fumeripits*, Sang Pencipta Fumeripits itu semua terdampar di pantai Irian sebelah selatan dalam keadaan tidak sadar. Nyawanya diselamatkan oleh sekelompok burung sehingga sehat lagi. Karena kesepian ia membangun rumah panjang, dan patung-patung dari kayu hasil ukirannya. Fumeripits kemudian memukul tifa berkali-kali, dan patung-patungnya itu menjadi hidup, menjadi manusia Asmat seperti yang kita kenal dewasa ini. (*Asmat*, h. 13).

Masyarakat di sekitar Candi Sukuh yang terletak di kompleks Gunung Lawu, tidak jauh dari Tawangmangu, Jawa Tengah, hingga dewasa ini masih mempunyai kesadaran sejarah, bahwa Sukuh dahulunya bekas kerajaan Brajadenta. Di situlah dahulu Gatotkaca, anak Bima dan Dewi Arimbi, dilahirkan. Sampai sekarang masyarakat masih berpantang menyebut

nama Gatotkaca, dan mereka menyebutkan sebagai Prabu Tutuka atau Kacanagara. Rakyat masih percaya, bahwa arwah Gatotkaca berada di bukit Pringgandani untuk melindungi kehidupannya, terutama di desa Poncol.

Bahkan pada awal zaman Orde Baru, rakyat masih memiliki kesadaran sejarah yang berkabut mitologi, seperti menyamakan dr. Subandrio dengan tokoh pewayangan Durna. Di kalangan Pandawa, nama Resi Durna mempunyai konotasi yang tidak luhur. Hal itu pun wajar, karena dalam masyarakat tokoh-tokoh pewayangan itu seakan-akan merupakan tokoh-tokoh yang pernah menyejarah, pernah hidup, dan sifat tokoh-tokoh tersebut ada di kalangan manusia hari ini.

3. Kesadaran Sejarah yang Perlu Dimiliki Masyarakat

Masyarakat Indonesia itu bercorak majemuk. Kesadaran sejarahnya juga memperlihatkan corak majemuk tadi. Terdapat kesadaran sejarah yang bersumber pada sejarah Sriwijaya, Majapahit, kerajaan-kerajaan Melayu, Mataram, dan para wali. Kesadaran sejarah demikian bercorak lokal. Antara kesadaran sejarah dengan kepribadian nasional memang terdapat kaitan yang akrab.

Dewasa ini kesadaran sejarah nasional perlu kita perhatikan, terutama sekali yang berkenaan dengan sejarah perjuangan bangsa dan pembangunan. Yang perlu ialah menunjukkan fakta-fakta dalam sejarah nasional, lalu menukarnya arti pada berbagai fakta itu, selanjutnya memberikan pandangan dan harapan.

Dalam praktek, kita perlu mengajarkan sejarah secara faktural, lalu meninjaunya dengan interpretasi yang kita sepakati bersama yang menjadi milik kita, yang sesuai dengan pandangan hidup kita, selanjutnya kita ajarkan demi masa depan, sesuai dengan garis pembangunan yang kita anut.

Nilai-nilai yang dianjurkan untuk melihat fakta-fakta sejarah adalah persatuan, kesatuan, kerelaan berkorban, kebersama-

an, harga menghargai, cinta bangsa, dan cinta tanah air. Masih banyak lagi nilai yang dapat digunakan seperti yang sudah dijabarkan dalam mengurai jiwa, semangat, nilai-nilai 1945 (*Dharma Pusaka* 45, Hasil seminar TNI-AD ke II tahun 1972). Di situ diuraikan sebanyak 36 indikator yang dijabarkan dari falsafah Negara Pancasila.

Kesadaran sejarah memang paling efektif diajarkan melalui pendidikan formal, dengan menggunakan sarana, buku teks, buku pelengkap, kepustakaan, alat peraga, situs sejarah, dan lain-lain.

Memang masih banyak faktor yang perlu dikaji dan diulang dan dimantapkan seperti teori tentang asal usul manusia, teori migrasi pengaruh kebudayaan India, lokasi Sriwijaya, masuknya agama Islam, gerakan modernisasi dalam Islam, teori penjajahan 350 tahun, kebangkitan nasional, teori mengenai tiga negara nasional, kepribadian Indonesia, Pemberontakan PKI 1926/1927, Revolusi Indonesia, nilai-nilai 1945, sistem politik, nasionalisme, dwifungsi ABRI, lahirnya Pancasila, rumusan Proklamasi kemerdekaan yang otentik, tokoh budaya, tokoh sejarah, tokoh kontroversial, tokoh legenda/mitos, dan lain-lain.

Pertunjukan *ketoprak* dan *ludruk* banyak sumbangannya pada pembinaan kesadaran sejarah, walaupun masih bertumpu pada mitologi dan seringkali bercorak anakronistik, sedangkan film Indonesia sudah banyak yang bertemakan sejarah, di antaranya *Enam Jam di Yogya*, *Toha Pahlawan Bandung Selatan*, *Janur Kuning*, *Pengkhianatan G-30-S/PKI*, *Nopember 1928*, *Loro Mendut*, *Sunan Kalijaga*, *Saijah dan Adinda*, *Ken Arok dan Ken Dedes*, *Kereta Api Terakhir*, *Kartini*, *Arya Penangsang dan Damarwulan*.

Film sejarah perlu memperoleh perhatian kita. Kalau dibiarkan tanpa campur tangan sejarawan, dapat berakibat jauh. Skenario film bertema sejarah harus dibuat bersama ahli sejarah.

Kantor kami pernah menilai berbagai skenario seperti *Untung Surapati* (dua versi: Abdul Muis dan Drs. Budiaman).

Kami memilih versi Budiaman, tetapi karena faktor-faktor lain maka tidak dapat direalisasi. Skenario *Kartini* juga pernah kami baca, dan terpaksa ditolak karena *vulgar* (dangkal). Demikian pula naskah film tentang *Battle in Surabaya* dan *Pemberontakan PKI Madiun 1948*, karena isinya penuh anakronisme, dangkal, ditolak juga. Mengenai film *Ken Arok dan Ken Dedes*, sungguh sayang, cerita sejarahnya cukup lumayan, meskipun terlalu dijejalkan, tetapi kemudian tidak lepas dari adegan-adegan yang pop, menjurus ke semi pornografi.

Sebetulnya film *Saijah dan Adinda* secara filmis amat bagus dan kuat. Sayang menimbulkan kesan seolah-olah tokoh Eduard Douwes Dekker (Multatuli), berperan sangat menonjol bagaikan pahlawan atau *Deus ex Machine* dalam sejarah penjajahan Belanda di Indonesia yang ternyata belum dapat diterima oleh kekenesan nasionalisme kita. Lagi pula diperkirakan dapat membawa dampak negatif aspek sosial-budaya dalam kehidupan kita, setidaknya-tidaknya di Banten.

Film *Nopember 1928*, cukup bagus meskipun belum sepenuhnya kolosal. Yang baik dalam film ini, tokoh utama Sentot Alibasyah dan Kyai Maja tetap diagungkan, tidak diperlakukan dengan sebebasnya. Kalau mau menambah bumbu yang menarik silahkan menerapkannya pada para figuran yang ahistoris. Film *Roro Mendut* amat bagus, dan berwibawa, demikian juga *Sunan Kalijaga*, dapat diserasikan antara sejarah dan folklore, antara seni dan ilmu. Film Pengkhianatan G-30-S/PKI segi historisnya amat bagus. Memang orang sejarah harus ikut dalam pembuatan film. Masih amat banyak aspek-aspek yang dapat kita garap, misalnya pakaian, tata bangunan, perhiasan, kehidupan sosial, pranata sosial, dan susunan zaman.

Demikian pula sandiwara dapat kita bantu, misalnya *Sumpah Palapa Gajah Mada*. Waktu Gajah Mada menerima keris dari sang Prabu Majapahit, tadinya mau dipakai gaya sang ksatria Eropa (*Ridder*) yang tentu tidak kena. Dalam hal ini sejarawan kita harus menguasai sejarah kebudayaan. Hendaknya kegiatan pengajian Javanologi, Sundanologi, Baliologi, Melayulogi dan

lain-lain dapat memberi sumbangan pada aspek-aspek sejarah kebudayaan itu.

Untuk pelajaran PSPB perlu dipelihara situs-situs sejarah, seperti monumen-monumen. Untuk wisata budaya juga perlu dipelihara situs-situs sejarah. Tetapi orang memerlukan bahan persepsi dulu sebelum datang ke situs-situs sejarah itu. Perlu membaca buku-buku yang menceritakan situs-situs sejarah tersebut. Karena itu Proyek Pembinaan Kesadaran dan Penjernihan Sejarah ini perlu menjurus ke sana. Pendek kata perlu digalakkan produksi naskah-naskah sejarah. Tetapi supaya jangan menumpuk tidak terpakai memang diperlukan dua tahap kerja. Pertama: menulis naskah bersifat ilmiah, dokumentasi, dan belum perlu *readable* untuk khalayak ramai.

Kedua: menulisnya kembali untuk masyarakat luas, kalau perlu dengan kerjasama dengan Balai Pustaka atau penerbit swasta.

S u m b e r

1. *Hasil Rapat Kerja Penyusunan Kerangka Masalah Pembinaan Kesadaran dan Penjernihan Sejarah*, Proyek PKPS, Jakarta 1984/1985.
2. *Arsip dan Sejarah*, Arsip Nasional RI, Jakarta, 1980.
3. Dr. Jan Romein, *In de Hof der Historis*, Querido's, Amsterdam, 1951.
4. Atmakusumah, Ed, *Tahta Untuk Rakyat*, Gramedia, Jakarta, 1982.
5. Williard A. Hanna, *Kepulauan Banda*, Gramedia, Jakarta, 1983.
6. Kompas, 25 Agustus 1984.
7. Dea Sudarman, *Asmat, Menyikap Budaya Suku Pedalaman Irian Jaya*, Sinar Harapan, Jakarta 1984.
8. *Candi Sukuh*, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Jakarta, 1972.

9. *Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai 1945*, Pusbangkurandik, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1983.
10. *Petunjuk Guru Sejarah Nasional Indonesia*, untuk SMP/SMA, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1982.—

Lampiran 1

**LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN
PROYEK PEMBINAAN KESADARAN DAN
PENJERNIHAN SEJARAH****I. Pendahuluan**

Pembinaan kesadaran sejarah masyarakat memerlukan sarana, prasarana, personil dan sistimatika yang memadai agar tidak menjurus kearah yang tidak diinginkan. Dalam kenyataan disamping kekurangan guru sejarah yang benar-benar memadai, bacaan dan sumber informasi kesejarahan untuk pendidikan di sekolah-sekolah masih jauh dari mencukupi. Demikian pula kemampuan penulis untuk mengungkapkan nilai-nilai kesejarahan perlu ditanamkan pada masyarakat melalui buku-buku, pertunjukan-pertunjukan dan media massa lainnya masih belum dapat diandalkan. Apalagi sistimatika penyebarluasan dan penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah.

Pembinaan kesadaran sejarah bagi masyarakat Indonesia sebagai satu bangsa yang baru merdeka dan bersatu diperlukan secara terus menerus dan terarah. Upaya pembinaan kesadaran itu bukan hanya didorong oleh karena mudanya usia sebagai satu bangsa, melainkan juga karena kenyataan bangsa Indonesia terwujud sebagai satu kesatuan masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu kesadaran sejarah bukan hanya diperlukan untuk meningkatkan rasa persatuan yang telah dilandasi oleh kebersamaan cita-cita, melainkan juga peningkatan kesatuan di atas kemajemukan.

Kenyataan tersebut telah mendorong pemerintah dan rakyat Indonesia untuk secara terus menerus membina persatuan dan kesatuan bangsa, antara lain dengan usaha

peningkatan kesadaran sejarah masyarakat sebagaimana yang tercermin dalam GBHN yang antara lain menyatakan :

"Dalam rangka meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta, wajib diberikan pendidikan sejarah perjuangan bangsa".

Sehubungan dengan usaha pembinaan kesadaran dan penjernihan sejarah maka Proyek Pembinaan Kesadaran dan Penjernihan Sejarah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional telah melakukan serangkaian kegiatan, yaitu mengadakan pertemuan-pertemuan (Rapat Kerja) dengan sejarawan, cerdik-pandai serta tokoh-tokoh masyarakat yang dilanjutkan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Dalam penelitian lapangan proyek membentuk tim peneliti dan menugaskannya untuk mendapatkan informasi dan mencari data-data yang berhubungan dengan pembinaan kesadaran dan penjernihan sejarah dari seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan tersebut telah dilakukan dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober dan November tahun 1984.

Dalam kegiatan ini para peneliti telah melakukan pengamatan dan mengadakan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat, guru-guru (guru SD, SMPT, SMTA), dosen, mahasiswa dan pelajar. Dari kegiatan tersebut proyek telah memperoleh hasil berupa masalah-masalah, pemikiran serta saran yang berkenaan dengan kepentingan pembinaan kesadaran dan penjernihan sejarah.

II. Masalah-masalah

1. Pada umumnya kalangan masyarakat luas perhatian serta pengetahuan tentang kesejarahan, khususnya Sejarah Nasional Indonesia sangatlah terbatas, kecuali orang-orang yang berkecimpung di lingkungan lembaga/instansi yang tugasnya khusus menangani bidang kesejarahan. Bahkan ada kalangan mahasiswa kurang

begitu memahami, apalagi menghayati arti sejarah bangsanya. Hal ini terutama yang menyangkut pahlawan bangsa dan peranan kerajaan-kerajaan yang hidup pada masa sebelum lahirnya kebangkitan nasional. Alasannya, karena mereka tidak mendapat pelajaran sejarah secara khusus. Dan karenanya tidaklah mengherankan bahwa untuk menanamkan kesadaran sejarah bagi mereka tersebut kiranya amatlah sulit.

2. Di pihak lain, terutama tokoh-tokoh masyarakat yang telah memiliki kesadaran sejarah yang tinggi melihat kedudukan sejarah daerah dalam Sejarah Nasional baik itu untuk konsumsi umum maupun untuk kepentingan pendidikan kurang mendapat tempat yang semestinya, sehingga Sejarah Nasional kita belumlah lengkap dan sempurna.

Seharusnya untuk membina sejarah, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di daerah perlu mendapat perhatian yang serius, karena peristiwa-peristiwa yang heroik dan patriotik di daerah merupakan kebanggaan tersendiri bagi putra-putra daerah yang bersangkutan. Nilai-nilai perjuangan tersebut merupakan bahagian dari perjuangan bangsa yang mengandung rasa persatuan dan kesatuan. Sehubungan dengan hal itu maka diharapkan penulisan Sejarah Nasional Indonesia di masa mendatang perlu disempurnakan, baik kuantitas maupun kualitasnya.

3. Sementara itu patut dibanggakan, karena kalangan muda seperti terlihat pada pelajar SMTA Kalimantan Selatan, khususnya Kodya Banjarmasin bahwa minat murid-murid terhadap pelajaran sejarah amatlah tinggi. Hal tersebut terlihat dari banyaknya minat anak-anak murid yang sedianya dapat diterima pada jurusan IPA, tetapi mereka memilih jurusan IPS karena senang pada pelajaran sejarah.

Minat terhadap sejarah terlihat juga pada mahasiswa FKG Lambung Mangkurat. Mahasiswa yang tidak tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Sejarah mengambil minor sejarah dan hasilnya cukup membanggakan, karena selain mendapat nilai yang baik mereka juga semakin terpicat pada sejarah, khususnya sejarah bangsanya.

4. Dalam kenyataan, bahwa banyak guru-guru sejarah di daerah baik untuk tingkat SMTP maupun SMTA tidak berasal dari lingkungan pendidikan sejarah. Pada umumnya mereka ditunjuk menjadi guru sejarah karena kekurangan tenaga, tetapi ada juga karena mereka senang terhadap sejarah. Sedangkan dalam praktek para guru tersebut banyak mendapat kesulitan, terutama karena kurang ditunjang oleh bahan bacaan kesejarahan yang memadai dan tidak bertumpu pada ilmu kesejarahan yang dalam. Dan akibatnya pengetahuan kesejarahan bagi murid-murid yang diajarnya semakin menipis.
5. Dengan diterapkannya kurikulum 75, matapelajaran sejarah semakin kurang mendapat tempat. Selain itu terasa sulitnya mendapatkan buku-buku pegangan baik untuk guru maupun bagi anak murid, sehingga hal ini sangat menyulitkan bagi guru-guru sejarah di daerah untuk menentukan patokan sebagai pegangan. Hal ini sangat terasa apabila timbul suatu permasalahan yang memerlukan jawaban yang tepat.

Buku-buku paket dan buku anjuran yang diedarkan dari pusat (Depdikbud) penyebarannya kurang lancar dan merata, dan anehnya buku-buku tersebut banyak tersimpan dalam almari/gudang yang menangani penyebarannya di daerah.

Karena itu untuk mengisi kekosongan tersebut maka guru-guru sejarah yang kreatifitasnya tinggi mencoba mencari bahan-bahan seperti yang dituntut oleh kuri-

kulum 75 dan menyusunnya menjadi diktat dan bahan inilah yang diberikan kepada anak-anak. Tetapi hal ini membawa dampak negatif, karena untuk memperoleh nilai yang baik anak murid hanya berpegang pada diktat tersebut dan tidak berminat lagi untuk membaca buku yang lain.

6. Tentang buku paket dan buku anjuran guru-guru memperoleh kesan, bahwa buku-buku tersebut kurang keutuhan logika dalam penyajiannya dan bahasanya terlalu berbelit-belit, sehingga sukar dipahami oleh anak murid. Selain itu masih terdapat kelemahan yang mendasar, terutama simpang siurnya penyajian fakta dan peristiwa yang terdapat dalam buku yang satu dengan buku yang lain. Hal ini selain menimbulkan pertanyaan dari anak murid juga membingungkan guru-guru yang menangani untuk memberikan jawaban yang tepat.

Dan sebagai akibatnya, sebagian anak murid di daerah menganggap pelajaran sejarah tidak lebih dari cerita dongeng yang berguna sebagai hiburan. Dan karenanya tidak mengherankan ada murid yang mengabaikan pelajaran sejarah. Dengan demikian tentu mereka tidak memahami sejarah bangsanya, apalagi menghayati nilai-nilai heroik dan patriotik para pendahulunya dan lebih-lebih bagi murid-murid kejuruan yang sama sekali tidak mendapatkan pelajaran sejarah.

7. Hal lain, berkurangnya minat murid pada pelajaran sejarah karena kurangnya keterampilan guru-guru sejarah memberikan pelajaran tersebut dan ada kesan murid, pelajaran sejarah membosankan. Hal ini karena guru-gurunya kurang mampu menghidupkan suasana yang intim antara murid dengan pelajaran sejarah. Para guru yang kaku dan berpengetahuan sempit dalam kesejarahan tidak jarang melakukan tugasnya dengan

mencatat, disuruh menghapuskan baik tahun maupun peristiwanya. Karenanya murid semakin menjauhi pelajaran sejarah.

8. Dengan dicanangkan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) mendapat sambutan yang baik dari kalangan pendidik maupun masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaannya merupakan beban yang cukup berat bagi guru, terutama karena belum meratanya kesempatan untuk mengikuti penataran dan juga belum tersedianya buku pegangan baik untuk guru maupun murid. Sedangkan buku *Tigapuluh Tahun Indonesia Merdeka* peredarannya sangat terbatas, sehingga tidak setiap orang dapat memilikinya.

Sementara itu banyak guru yang mempertanyakan tentang materi yang akan diberikan atau diajarkan, karena menurut pengamatan mereka belum ada garis pemisah yang tegas antara pelajaran yang diberikan dalam IPS dengan PMP.

III. Saran-saran

1. Sehubungan dengan pembinaan kesadaran sejarah, sebaiknya pelajaran sejarah diberikan sejak masa anak-anak (*Taman Kanak-kanak*). Pelajaran sejarah dimulai dari sejarah daerah dengan menanamkan nilai-nilai perjuangan dari tokoh daerah dan kemudian sejarah bangsa.
2. Penulisan buku pelajaran sejarah nasional supaya dilengkapi dengan peristiwa-peristiwa perjuangan yang penting yang terdapat pada tiap-tiap daerah.
3. Dalam penulisan buku teks sebaiknya ada ketegasan tentang tanggal, bulan dan tahunnya, sehingga tidak membingungkan anak murid dan guru.
4. Dalam penulisan buku sejarah diperlukan semacam interpretasi normatif tentang Sejarah Nasional. Untuk

hal tersebut diperlukan :

- a. Orientasi yang tepat dalam penulisan
 - b. Seleksi peristiwa yang signifikan
 - c. Tingkat penjelasan sejarah.
5. Tentang bahasa supaya dipakai bahasa yang mudah dimengerti dan tidak bertele-tele, sehingga menambah kegairahan bagi anak-anak murid untuk mengenal sejarah lebih jauh.
 6. Khusus buku pelajaran sejarah untuk murid selain uraian yang menarik juga dilengkapi dengan gambar-gambar tokoh, peristiwa serta tempat kejadian lainnya.
 7. Para guru, khususnya guru sejarah diharapkan dalam memberikan pelajaran sejarah dapat memberikan gambaran/dialog dari tokoh untuk dapat menggugah rasa kebangsaan. Dan sebaiknya guru-guru dapat membuat suatu ringkasan/schema dan tidak hanya mencatat saja.
 8. Untuk kepentingan pengajaran sejarah supaya dapat memperbanyak tenaga-tenaga baru yang siap pakai dan guru-guru yang telah ada supaya sering melakukan pertemuan baik dalam seminar atau penataran-penataran. Dengan demikian perkembangan baru dalam kesejarahan dapat diikuti sebagai penambah pengetahuannya.
 9. Dalam pembinaan guru-guru sejarah hendaknya diperhatikan kualitatifnya, serta kepada mereka sebaiknya diberikan bahan-bahan kesejarahan.
 10. Untuk guru-guru sejarah sebaiknya diterbitkan sebuah majalah sebagai wadah untuk menyalurkan pemikiran-pemikiran untuk pendidikan sejarah ataupun berperan sebagai sumber informasi baru tentang perkembangan ilmu sejarah, khususnya bermanfaat dalam pendidikan sejarah.

11. Buku-buku paket kurikulum 75 sebaiknya dapat disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku sekarang. Dalam hal ini supaya pemerintah segera turun tangan untuk menangani kekurangan buku-buku pelajaran dan buku-buku bacaan di perpustakaan-perpustakaan daerah.
12. Buku-buku hasil sasterawan atau pujangga-pujangga yang berisi gambaran masyarakat masa lalu serta ajaran-ajaran keutamaan supaya dapat dialihbahasakan dan disebarluaskan untuk sekolah-sekolah atau mengisi perpustakaan-perpustakaan di seluruh Indonesia.

Dan untuk menambah bahan bacaan kesejarahan supaya skripsi para mahasiswa tentang kesejarahan dapat diterbitkan oleh proyek ataupun badan yang ditunjuk.

13. Buku pengetahuan sejarah dapat disebarluaskan secara cuma-cuma. Begitu juga buku-buku hasil penulisan dari Proyek IDSN dan IDKD agar dapat disebarluaskan ke daerah-daerah. Dan bila memungkinkan buku-buku yang telah diterbitkan oleh kedua proyek tersebut untuk penyebarluasannya dapat diterbitkan kembali oleh daerah yang bersangkutan.
14. Para mahasiswa sebaiknya untuk menambah pengetahuan kesejarahan dapat diberikan ceramah-ceramah dari sejarawan-sejarawan Indonesia terutama yang telah dikenal atau telah punya nama. Di samping itu disiapkan diskusi antara PTN/PTS dan hasilnya kemudian dibahas dengan tim pusat. Penyelenggaraan tersebut ada baiknya diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali dan pada kesempatan ini juga dilangsungkan pameran benda-benda museum daerah/pusat. Dengan demikian dalam satu saat dan tempat yang sama berlangsung dua kegiatan tentang pengungkapan sejarah.
15. Untuk meningkatkan kesadaran sejarah dan pelajaran sejarah, maka mahasiswa jurusan sejarah diberikan beasiswa.

16. Begitu juga untuk meningkatkan perhatian atau minat pelajar pada sejarah agar diadakan diskusi antara mereka tentang topik atau masalah yang menyangkut kesejarahan. Dengan demikian mereka akan terlibat dalam pembicaraan-pembicaraan ataupun sebagai pendengar.
17. Untuk membantu para guru dan murid dalam memahami buku-buku sejarah, terutama menyangkut pelajaran disediakan alat peraga. Dan disetiap sekolah supaya tersedia peta sejarah.
18. Untuk meningkatkan sejarah bagi masyarakat atau murid khususnya maka ditiap daerah dibuat diorama episode lokal, serial monografi dan laboratorium sejarah. Kemudian sering dilakukan pameran oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini ditangani oleh PSK dan kepada setiap penonton (murid) diharuskan membuat laporan tertulis. Selain itu PSK melaksanakan sayembara membuat gambar, patung, karangan, gambar-gambar tokoh dan peristiwa bersejarah.

Dalam kurikulum pelajaran sejarah dimasukkan kegiatan untuk melihat benda-benda bersejarah di museum ataupun mengadakan kunjungan ke tempat-tempat peninggalan sejarah.

19. Untuk mendapatkan gambaran akan aktivitas bangsanya maka perlu ditangani secara serius filem-filem sejarah. Dan agar murid diberi fasilitas untuk melihatnya seperti umpama Janur Kuning, November 1928 dan lain-lain.

Selain itu diterbitkan buku komik atau serial kaset dengan menampilkan dialog dari tokoh/pahlawan bangsa, juga naskah-naskah drama yang dapat dimainkan anak didik serta dapat menontonnya.

20. Peristiwa-peristiwa sejarah diperingati secara kontinyu disertai dengan uraian yang memadai.
21. Benda-benda sejarah agar dirawat dan dilestarikan dan di tingkat SMTA diberikan pelajaran dasar arkeologi.

22. Untuk menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap daerahnya perlu didirikan monumen-monumen perjuangan untuk dapat dihayati oleh generasi muda sebagai penerus bangsa.

Sehubungan dengan itu maka nama tokoh atau pahlawan daerah dipakai sebagai nama-nama jalan di samping nama pahlawan nasional. Hal ini perlu demi penghayatan nilai-nilai perjuangan masa lampau.

23. Perkumpulan pemuda hendaknya dapat menunjukkan identitas bangsanya seperti yang telah dilakukan oleh pemuda pada tahun 1908, yaitu Budi Utomo dan lain-lain. Dan di luar jam pelajaran para pelajar diarahkan pada kegiatan remaja seperti kepramukaan, wira-swasta dan lain-lain.
24. Tentang PSPB selain buku *Tigapuluh Tahun Indonesia Merdeka* supaya buku pedoman segera diterbitkan dan disebarakan ke daerah-daerah. Sehubungan dengan masalah ini alangkah baiknya bila dibuat filem yang dapat menggugah minat siswa seperti filem dokumen sejarah atau semacam slide pada pelajaran IPA.
25. Generasi muda perlu diperkenalkan dengan historiografi tradisional.

IV. Kesimpulan

1. Pada umumnya kesadaran sejarah di kalangan masyarakat, khususnya kalangan pendidik masih sangat rendah. Hal ini karena guru kurang memiliki keterampilan mengajar sehingga tidak menarik bagi anak didik. Di samping itu kurang ditunjang oleh sumber-sumber referensi dan sarana penunjangpun kurang mendapat perhatian.
2. Untuk peningkatan pembinaan kesadaran sejarah, perlu ditingkatkan pengetahuan para guru, khususnya guru sejarah. Selain itu perlu juga diimbangi dengan ke-

lengkapan dan peningkatan sumber informasi, baik berupa buku sejarah Indonesia yang baru maupun artikel-artikel tentang kesejarahan beserta sarana penunjang seperti: peta Indonesia, peta sejarah, filem dokumenter, slide, poster-poster, diorama-diorama, gambar-gambar tokoh/pahlawan, peristiwa sejarah, filem cerita sejarah dan monumen-monumen perjuangan.

3. Di samping itu sebaiknya PSK sering mengadakan sayembara-sayembara seperti membuat gambar, patung, karangan, mengumpulkan gambar-gambar tokoh/pahlawan ataupun peristiwa sejarah dan lain-lain, serta sering mengadakan pameran-pameran.
4. Sehubungan dengan penjernihan sejarah masih banyak kelemahan-kelemahan yang mendasar baik pada buku paket maupun buku anjuran. Dan yang menjadi masalah serta mengganggu adalah perbedaan fakta atas peristiwa yang sama antara buku yang satu dengan buku yang lain. Di samping itu di daerah-daerah masih banyak masalah-masalah yang perlu dijernihkan.
5. Untuk melengkapi isi Sejarah Nasional maka hendaknya peristiwa di daerah yang bertaraf nasional mendapat tempat yang semestinya dalam lembaran Sejarah Nasional.

Lampiran 2

**HASIL RAPAT KERJA
PENYUSUNAN KERANGKA MASALAH
PEMBINAAN KESADARAN DAN PENJERNIHAN SEJARAH**

A. PENGANTAR

Rapat Kerja Proyek Pembinaan Kesadaran dan Penjernihan Sejarah, dari tanggal 27 s.d. 30 Desember 1984 di Cibogo; setelah mendengar, menanggapi, dan membahas :

- a. Pengarahan dari Direktur Jenderal Kebudayaan
- b. Pengantar Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional
- c. Diskusi Panel yang dipimpin oleh Dr. S. Budhisantoso, dengan panelis:
 - 1) Drs. Abdurachman Suryomihardjo
 - 2) Drs. Bambang Sumadio
 - 3) Drs. Bastomi Ervan
 - 4) Dr. Djoko Suryo
 - 5) Drs. Lopian, A.B.
 - 6) Dra. Nana Nurliana
 - 7) Dr. Taufik Abdullah
 - 8) Dr. Usman Pelly
- d. Makalah dan Pembahasan Hasil Pengumpulan data di Lapangan :
 - 1) Drs. Anhar Gonggong
 - 2) Dr. Ayatrohaedi
 - 3) Dr. Djoko Suryo
 - 4) Sutrisno Kutoyo
- e. Perumusan Hasil Rapat Kerja yang diadakan dari tanggal 3 s.d. 7 Mei 1984.
Maka dalam sidangnya yang terakhir tanggal 30 Desember 1984 menyimpulkan beberapa hal yang berkenaan dengan :
(A) Pembinaan Kesadaran Sejarah, (B) Penjernihan Sejarah, dan (C) Langkah Kerja sebagai berikut :

B. PEMBINAAN KESADARAN SEJARAH

I. Pengertian

Pada tahap yang paling awal Kesadaran Sejarah adalah gambaran dan makna tentang masa lampau yang dianut suatu komunitas.

Dalam pengertian yang lebih mutakhir, kesadaran sejarah berarti gambaran dan makna tentang kenyataan bahwa manusia hidup dalam suatu konteks sosio-kultural dalam prespektif sejarah.

Pada pengertian yang pertama kesadaran sejarah sebagaimana sering digambarkan dalam berbagai historio-grafi tradisional merupakan bagian dari proses sosialisasi kultural, pada pengertian kedua, kesadaran sejarah tak terlepas dari pengetahuan kognitif. Dengan demikian kedua pengertian kesadaran sejarah itu lebih banyak berada dalam dimensi makna, dari pada dimensi kebenaran.

II. Kedudukan dan Fungsi Kesadaran Sejarah

Kesadaran sejarah berkedudukan sebagai landasan kontinuitas kultural dan integrasi nasional. Dengan kedudukan itu, kesadaran sejarah berfungsi sebagai :

- a. kerangka dalam memahami realitas lingkungan
- b. tolok ukur pandangan dunia yang wajar
- c. salah satu faktor yang memberi arah dan pembinaan harapan dari depan
- d. salah satu faktor pembentukan motif dalam pola tindakan.

III. Masalah

1. Adanya tiga corak "Kesadaran Sejarah", yaitu yang terbina oleh:
 - a. tradisi etnis-kultural
 - b. kesadaran religius yang melampaui batas-batas kultural

- c. Pengalaman bersama dalam hasrat integrasi nasional.
- 2. Kedudukan kesadaran sejarah sebagai landasan kontinuitas kultural dan integrasi nasional memungkinkan terjadinya pembenturan:
 - a) di antara ketiga corak kesadaran sejarah tersebut dan
 - b) antara dimensi makna dan dimensi kebenaran.

IV. Tujuan Pembinaan Kesadaran Sejarah

- a. Tanpa mengingkari pentingnya keragaman corak kesadaran sejarah yang bersifat tradisional dan religius, pembinaan kesadaran sejarah diutamakan bagi usaha pemupukan integrasi nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945.
- b. Bertolak dari pemahaman tentang masa lampau, pembinaan kesadaran sejarah ditujukan membina kesadaran kehidupan dalam konteks sosio-kultural yang historis dan dinamis, untuk memperoleh makna dan kearifan sejarah.
- c. Usaha menganalisa khasanah pengetahuan berbagai corak kesadaran sejarah komunitas-komunitas etnis dan religius akan:
 - 1) lebih memungkinkan kita untuk merumuskan strategi sosio-kultural yang lebih akurat dalam pembangunan nasional,
 - 2) menumbuhkan saling mengerti dan saling menghargai antar komunitas, dan
 - 3) meniadakan atau setidaknya memperkecil pengaruh stereotip-stereotip negatif.

C. PENJERNIHAN SEJARAH

I. Pengertian

Penjernihan sejarah ialah upaya memperbaiki kesalahan yang terdapat di dalam karya sejarah, mengisi kekosongan

dalam pengetahuan sejarah, dan mengembalikan kelampauan pada konteks sejarahnya dengan membedakan realitas dari mitos.

II. Sasaran

Dalam melakukan penjernihan, perlu diperhatikan beberapa masalah:

1. Kemungkinan adanya distorsi fakta karena:
 - a) kurangnya informasi yang ditemukan, sehingga
 - (1) hal-hal yang mendasar dalam sejarah seperti apa, siapa, bila dan dimana tidak lengkap, dan keutuhan rekonstruksi sejarah menjadi terganggu.
 - (2) munculnya hal-hal yang bersifat kontroversial dalam sejarah, sehingga fakta sejarah yang telah umum diterima masyarakat (accepted history) mulai dipertanyakan.
 - (3) adanya peniadaan dan pemalsuan fakta sejarah untuk tujuan-tujuan tertentu.
 - b) Anakronisme dalam fakta sejarah sebagai akibat terkacaukannya dimensi waktu dalam pemakaian fakta. Hal ini akan menimbulkan berbagai persoalan, seperti:
 - (1) terkacaukannya hubungan kausalitas antara sesama fakta.
 - (2) peristiwa dapat dianggap terjadi dalam konteks pelembagaan sosial-ekonomis yang berbeda.
 - (3) rekonstruksi peristiwa yang tidak utuh dan terpenggal-penggal, atau terjadinya kekacauan dalam *apa, siapa, di mana*, dan *bila* dari peristiwa.
2. Kemungkinan adanya tafsiran yang salah dalam karya sejarah sebagaimana dapat dilihat dalam :

- a) anakronisme tafsiran, yakni memakai realitas sekarang (baik dari sudut nilai, norma, maupun situasi) dalam menerangkan masa lampau;
 - b) ketidak-ajegan (inkonsistensi) yakni tidak terdapatnya keutuhan logika dalam usaha menerangkan peristiwa sejarah;
 - c) terlepasnya analisa dan tafsiran dari kenyataan faktual akibat keinginan normatif yang berlebihan dalam usaha menerangkan sejarah; hasrat ideologisasi menyebabkan sejarah dipakai sebagai alat pembenaran ideologi yang dianut;
 - d) kedangkalan dan kerancuan dalam penerapan konsep-konsep dan wawasan teoritik.
3. Kemungkinan adanya mitologisasi dalam karya sejarah, yakni proses terjadinya pencampuran peristiwa sebagai realita dengan nilai-nilai sosio-kultural. Proses ini bisa juga mengambil bentuk ketika nilai-nilai diaktualkan sebagai fakta sejarah.

Mitologisasi ini terjadi karena :

- a) peristiwa atau tokoh penting bagi kehidupan suatu masyarakat tidak terekam dengan baik;
- b) pengalaman masa lampau yang tidak terekam baik dijadikan pegangan bagi masa kini; dan
- c) sejarah dipakai sebagai pembenaran tata sosial yang berlaku.

Dalam konteks masyarakat modern dan yang sedang mengalami transisi, mitologisasi dapat terjadi dalam penggambaran tokoh dan rekonstruksi peristiwa.

III. Usaha-usaha yang dapat dilakukan

Penjernihan sejarah dapat dilaksanakan dengan :

- 1. penggalian sumber-sumber baru, dan
- 2. kritik sumber (baik lama maupun baru)
- 3. penjernihan konsep-konsep sejarah secara tepat dan pada tempatnya.

4. peningkatan mutu penulisan dan penerbitan, sesuai dengan lingkungan pembaca.

D. LANGKAH KERJA

Untuk langkah kerja empat tahun mendatang, disarankan agar Proyek Pembinaan Kesadaran dan Penjernihan Sejarah dapat dipertimbangkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan telah ulang pada buku-buku teks dan karya kesejarahan lainnya (seperti: lukisan, patung, film, diorama dan lagu) yang beredar di masyarakat.
2. Menyusun dan menerbitkan buku pegangan dan kamus sejarah.
3. Menerbitkan media berkala untuk menyebarkan informasi aktual tentang sejarah serta menjalin hubungan dan kerjasama dengan media komunikasi lain untuk menanamkan kesadaran sejarah.
4. Melakukan identifikasi dan penafsiran terhadap lambang-lambang pemerintah daerah tingkat I dan II seluruh Indonesia sebagai salah satu usaha untuk mengetahui pola-pola kesadaran sejarah yang telah dirumuskan.
5. Melakukan pembinaan kesadaran sejarah dan penulisan khusus untuk daerah-daerah tertentu, seperti Timor-Timur dan Irian Jaya.
6. Melakukan pengumpulan data untuk mengetahui tingkat, keluasan cakrawala, dan persepsi kesadaran sejarah di dalam masyarakat, baik di tingkat Sekolah Dasar, SMTP, SMTA, mahasiswa dan masyarakat umum.
7. Menyelenggarakan pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan Pembinaan Kesadaran dan Penjernihan Sejarah.
8. Menyelenggarakan pertemuan dengan penulis-penulis kesejarahan.

Cibogo, 30 Desember 1984

Tim Perumus Penyusunan Konsep Pembinaan
Kesadaran dan Penjernihan Sejarah

Ketua : Dr. S. Budhisantoso
Wakil Ketua : Dr. Taufik Abdullah
Sekretaris : Dr. Mukhlis
Anggota : Drs. Abdurachman Suryomihardjo
Drs. Anhar Gonggong
Dr. Ayatrohaedi
Drs. Bambang Sumadio
Drs. J.R. Chaniago
Dr. Djoko Suryo
Dr. Kuntowijoyo
Drs. A.B. Lapian
Dr. Usman Pelly

